



# LAPORAN KINERJA PENGADILAN TINGGI MANADO

**2024**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Manado. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pereviu I

(Danardono, S.H.,M.H.)

Manado, 26 Februari 2025

Pereviu II

(Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.)

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN TINGGI MANADO

No	Pernyataan	Check List
1. Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
	2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
	3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
	4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2. Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
	2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
	4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
	5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
	6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
	7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya.	✓
3. Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
	2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓

	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	✓
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
	10. IKU dan IK telah SMART	✓

Manado, 26 Februari 2025

Pereviu I



(Danardono, S.H.,M.H.)

Pereviu II



(Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.)

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Seluruh kinerja Pengadilan Tinggi Manado didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2024 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Manado, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Manado diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Pengadilan Tinggi Manado.

Dua sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian sebesar 106,65% untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dan sebesar 105,26% untuk Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”. Sedangkan rata-rata capaian seluruh indikator adalah sebesar 105,95%, dengan rincian sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis 1</b>			
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>
a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	100	105,26
b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	100	105,26
c. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	100	105,26
d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35	39,18	111,94
e. Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas terhadap Layanan Peradilan	90	94,89	105,55
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1</b>			<b>106,65</b>
<b>Sasaran Strategis 2</b>			
<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>			
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu	95	100	105,26
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu	95	100	105,26
c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu	95	100	105,26
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1</b>			<b>105,26</b>
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>105,95</b>

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
KATA PENGANTAR .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	2
A. LATAR BELAKANG .....	3
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	4
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	5
D. ISU STRATEGIS .....	6
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 .....	10
VISI DAN MISI .....	10
TUJUAN .....	10
SASARAN STRATEGIS .....	11
PROGRAM DAN KEGIATAN .....	11
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024 .....	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	12
BAB III CAPAIAN KINERJA .....	14
A. CAPAIAN KINERJA .....	15
1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel .....	16
1.A. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	16
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir .....	17
1.B. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	18
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir .....	19
1.C. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	19
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir .....	20
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	21
Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata, Pidana dan Pidana Khusus Secara Tepat Waktu .....	22
1.D. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi .....	22
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir .....	23

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah .....	24
1.E. Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan .....	24
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir .....	25
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah .....	26
Keberhasilan Indikator Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan .....	26
2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara .....	26
2.A. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu .....	27
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir .....	28
2.B. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Diselesaikan Tepat Waktu .....	28
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir .....	29
2.C. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirimkan ke Pengadilan Tepat Waktu .....	30
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir .....	31
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	32
Keberhasilan Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata, Pidana dan Pidana Khusus Secara Tepat Waktu .....	32
Perbandingan Capaian Kinerja di Level Nasional .....	33
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	36
A. Sumber Daya Manusia .....	36
B. Sumber Daya Anggaran .....	36
B. REALISASI ANGGARAN .....	37
DIPA (01) .....	37
DIPA (03) .....	39
Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja ...	40
1. Program Dukungan Manajemen .....	40
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum .....	40
BAB IV PENUTUP .....	41
A. KESIMPULAN .....	42
B. REKOMENDASI .....	42
LAMPIRAN .....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Kantor Pengadilan Tinggi Manado.....	3
Gambar I.2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Manado .....	5
Gambar III.1. Rekap Data Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024 .....	34

## DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	18
Grafik III.2. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	19
Grafik III.3. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	21
Grafik III.4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	23
Grafik III.5. Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan .....	25
Grafik III.6. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	28
Grafik III.7. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	30
Grafik III.8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	31
Grafik III.9. Persentase Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	38
Grafik III.10. Persentase Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Manado .....	5
Tabel I.2. Uraian Tugas Jabatan pada Pengadilan Tinggi Manado .....	5
Tabel I.3. Isu Strategis dan Kebijakan Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2024 .....	7
Tabel II.1. Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2024 .....	12
Tabel II.2. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2024 .....	12
Tabel III.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 .....	16
Tabel III.2. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Secara Tepat Waktu Tahun 2024 .....	17
Tabel III.3. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	17
Tabel III.4. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Secara Tepat Waktu Tahun 2024 .....	18
Tabel III.5. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	19
Tabel III.6. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Secara Tepat Waktu Tahun 2024 .....	20
Tabel III.7. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	21
Tabel III.8. Persentase Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	21
Tabel III.9. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024 .....	23
Tabel III.10. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	23
Tabel III.11. Persentase Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	24
Tabel III.12. Persentase Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi Tahun 2024 .....	25
Tabel III.13. Persentase Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	26
Tabel III.14. Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tahun 2024 .....	27
Tabel III.15. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	28
Tabel III.16. Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tahun 2024 .....	29
Tabel III.17. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	29
Tabel III.18. Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tahun 2024 .....	30
Tabel III.19. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke	

Pengadilan Pengaju Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	31
Tabel III.20. Persentase Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	32
Tabel III.21. Rekapitan Data Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024 .....	33
Tabel III.22. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2024 .....	35
Tabel III.23. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran .....	36
Tabel III.24. Pagu Anggaran DIPA (01) Tahun Anggaran 2024 .....	37
Tabel III.25. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja DIPA (01) Tahun Anggaran 2024 .....	38
Tabel III.26. Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	38
Tabel III.27. Pagu Anggaran DIPA (03) Tahun Anggaran 2024 .....	39
Tabel III.28. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja DIPA (03) Tahun Anggaran 2024 .....	39
Tabel III.29. Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 .....	39



**AMIN SUTIKNO, S.H.,M.H.**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO**

### **KATA PENGANTAR**


Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Manado ini mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pengadilan Manado Tahun 2024 merupakan laporan yang menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Manado, bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada setiap *stakeholder* serta menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Pengadilan Tinggi Manado dan diharapkan dapat menjadi alasan peningkatan kualitas pelayanan publik serta terwujudnya aparatur peradilan yang BerAKHLAK.

Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini bermanfaat dan diharapkan adanya umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Manado.

Manado, 26 Februari 2025  
Ketua Pengadilan Tinggi Manado

  
AMIN SUTIKNO, S.H.,M.H.



# **BAB I PENDAHULUAN**

- **LATAR BELAKANG**
- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**
- **STRUKTUR ORGANISAS**
- **ISU STRATEGIS**
- **SISTEMATIKA PENYAJIAN**

## A. LATAR BELAKANG



Pengadilan Tinggi Manado adalah peradilan di lingkungan Peradilan Umum, sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan upaya hukum banding dari Pengadilan Negeri di Sulawesi Utara. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado meliputi seluruh wilayah provinsi Sulawesi Utara yang terbagi dalam 15 Kabupaten/Kota.

Gambar 1.1. Kantor Pengadilan Tinggi Manado

Pengadilan Tinggi Manado membawahi 8 (delapan) Pengadilan Negeri yaitu :

1. Pengadilan Negeri Manado, meliputi Kota Manado dan sebagian Minahasa;
2. Pengadilan Negeri Bitung, meliputi Kota Bitung;
3. Pengadilan Negeri Tondano, meliputi Kabupaten Minahasa dan Minahasa Tenggara;
4. Pengadilan Negeri Tahuna, wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Sangihe dan Sitaro (Siau, Tagulandang & Biaro);
5. Pengadilan Negeri Kotamobagu, meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, Timur, Selatan dan Kota Kotamobagu;
6. Pengadilan Negeri Airmadidi, meliputi Kabupaten Minahasa Utara;
7. Pengadilan Negeri Amurang, meliputi Kabupaten Minahasa Selatan; dan
8. Pengadilan Negeri Melonguane, meliputi Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pengadilan Tinggi Manado senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip – prinsip *good governance*. Untuk menciptakan tatalaksana pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu kewajiban Pengadilan Tinggi Manado adalah melaksanakan asas akuntabilitas melalui pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis berpedoman pada :

1. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah;
2. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada

- Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya; dan
  6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT.01.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2024 merupakan suatu sistem manajemen yang berorientasi pada hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan perbandingan realisasi pelaksanaan program dengan target yang telah ditentukan dalam indikator kinerja utama sehingga tingkat kinerja Pengadilan Tinggi Manado dapat diukur berdasarkan perbandingan tersebut.

## B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Manado sebagai kawal depan (*voorpost*) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia di daerah, memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal 51.

TUGAS PENGADILAN TINGGI	FUNGSI PENGADILAN TINGGI
<p>Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding;</p> <p>Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta;</p>	<p>Fungsi Mengadili (<i>Judicial Power</i>), yakni memeriksa dan mengadili perkara – perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi;</p> <p>Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan;</p> <p>Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya pengadilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum;</p>

Pengadilan Tinggi dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Tabel I.1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Manado

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 18 Agustus 1996 dan perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :



Gambar I.2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Manado

Berikut uraian tugas masing – masing jabatan tersebut :

**Ketua** sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, serta sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

**Wakil Ketua** mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal pelaksanaan tupoksi Pengadilan. Apabila Ketua berhalangan maka secara otomatis Wakil Ketua bertindak melaksanakan fungsi Ketua. Wakil Ketua juga melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua.

**Hakim** bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya.

**Panitera** mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

<b>Panitera Muda Pidana</b> mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain- lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.	<b>Bagian Perencanaan &amp; Kepegawaian</b> mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.	<b>Bagian Umum &amp; Keuangan</b> mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
<b>Panitera Muda Perdata</b> mempunyai tugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain- lain yang berhubungan dengan perkara perdata.	<b>Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran</b> mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.	<b>Sub Bagian Kepegawaian &amp; TI</b> mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan
<b>Panitera Muda Pidana Khusus (Tipikor)</b> bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain- lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti.	<b>Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga</b> mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.	<b>Sub Bagian Keuangan &amp; Pelaporan</b> mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.
<b>Panitera Muda Hukum</b> mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.	<b>Pranata Komputer</b> mempunyai tugas untuk merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	<b>Analisis Pengelola Keuangan APBN</b> bertugas melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN, yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, serta analisis laporan keuangan instansi.
<b>Panitera Pengganti</b> mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.	<b>Pranata Keuangan APBN</b> bertugas melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi: perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi.	

Tabel 1.2. Uraian Tugas Jabatan pada Pengadilan Tinggi Manado

#### D. ISU STRATEGIS

Pengadilan Tinggi Manado sebagai pengadilan tingkat banding dan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia, membawahi 8 (delapan) Pengadilan Negeri dan memiliki peran strategis dalam hal mengadili perkara tingkat banding di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerah apabila diminta, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama yang ada di wilayah hukumnya. Pada tahun 2024, Pengadilan Tinggi Manado telah melaksanakan kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta kinerja Pengadilan Tinggi Manado.

Isu Strategis	Kebijakan
<b>Peningkatan Penyelesaian Perkara</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Teknis antara Pimpinan dengan Hakim Tinggi untuk membahas teknis penyelesaian perkara;</li> <li>2. Rapat Teknis antara Panitera Pengadilan Tinggi Manado dengan Panitera dan Panitera Muda pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado;</li> <li>3. Rapat Teknis Pimpinan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado dengan Hakim, Panitera dan Unit Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado;</li> <li>4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi akurasi dan kualitas data SIPP Pengadilan Tinggi Manado; dan</li> <li>5. Pembinaan dan Pengawasan oleh Ketua/Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.</li> </ol>
<b>Peningkatan Kompetensi Aparatur/ SDM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan nama – nama aparatur/SDM untuk mengikuti pengembangan kompetensi;</li> <li>2. Peningkatan Kinerja melalui pembinaan dan pengawasan baik pada Pengadilan Tinggi Manado maupun Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado; dan</li> <li>3. Melaksanakan pengawasan bidang serta tindak lanjut atas temuan – temuan.</li> </ol>
<b>Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Sistem Pelayanan Publik yang berbasis pada teknologi informasi yaitu Penyempahan Advokat, Informasi Layanan, Pengaduan, Survey Kepuasan Masyarakat &amp; IPAk;</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada Petugas PTSP.</li> </ol>
<b>Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi asesor AMPUH untuk Hakim Tinggi; dan</li> <li>2. Melaksanakan asesmen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH).</li> </ol>

<b>Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)</b>	Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
---	---

Tabel 1.3. Isu Strategis dan Kebijakan Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2024

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

### Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III. Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### Lampiran

- 1 . Perjanjian Kinerja
- 2 . Lain-lain yang dianggap perlu



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024**
- **RENCANA KINERJA TAHUN 2024**
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

## **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024**

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen lembaga jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Manado melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

### **VISI DAN MISI**

Adapun visi Pengadilan Tinggi Manado yaitu :

***Terwujudnya Pengadilan Tinggi Manado yang Agung***

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Manado sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara. Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Manado menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Manado;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Manado; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Manado.

### **TUJUAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Manado yaitu :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; dan
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

## **SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Manado adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;  
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini, sebagai berikut :
  - a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.
  - b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.
  - c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu.
  - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
  - e. Indeks Persepsi *Stakeholder* yang Puas terhadap Layanan Peradilan.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;  
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini, sebagai berikut :
  - a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
  - b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
  - c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

## **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Manado menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen  
Pada tahun 2024, Program Dukungan Manajemen pada Pengadilan Tinggi Manado terdiri dari Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Program dan kegiatan ini untuk mendukung indikator kinerja :
  - a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.
  - b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.
  - c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu.
  - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
  - e. Indeks Persepsi *Stakeholder* yang Puas terhadap Layanan Peradilan.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Manado yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan kegiatan ini untuk mendukung indicator kinerja :
  - a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
  - b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
  - c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Manado tahun 2024 memuat angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*Performance Agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu <ul style="list-style-type: none"><li>- Perdata</li><li>- Pidana</li><li>- Pidana Khusus</li></ul>	95%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35%
		c. Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas terhadap Layanan Peradilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu <ul style="list-style-type: none"><li>- Perdata</li><li>- Pidana</li><li>- Pidana Khusus</li></ul>	95%

Tabel II.1. Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2024

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2024 telah mengalami revisi satu kali yang disebabkan oleh pergantian Ketua Pengadilan Tinggi Manado.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu <ul style="list-style-type: none"><li>- Perdata</li><li>- Pidana</li><li>- Pidana Khusus</li></ul>	95%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35%

		c. Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas terhadap Layanan Peradilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	95%
	<b>Kegiatan</b>		<b>Anggaran</b>
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	21.663.819.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	193.775.000,-

*Tabel II.2. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2024*



## BAB III

- **CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**
- **REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024**



## A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun 2024. Analisis capaian kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional;
5. Melakukan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Manado merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang ditetapkan pada tahun 2024. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado pada Tahun 2024 dinyatakan "**Berhasil**" karena :

1. Rata-rata capaian sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100%, yaitu sebesar 101,7%. Capaian untuk Sasaran Strategis "*Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*" dan sebesar 106,65%, dan untuk Sasaran Strategis "*Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*" sebesar 105,26%; dan
2. Seluruh target indikator kinerja berhasil memperoleh capaian >100%.

<b>Sasaran Strategis 1</b>			
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>
a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	100	105,26
b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	100	105,26
c. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	100	105,26
d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35	39,18	111,94
e. Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas terhadap Layanan Peradilan	90	94,89	105,55
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1</b>			<b>106,65</b>
<b>Sasaran Strategis 2</b>			
<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>			
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu	95	100	105,26
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu	95	100	105,26
c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu	95	100	105,26
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1</b>			<b>105,26</b>
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>105,95</b>

Tabel III.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

## 1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima. Sasaran ini untuk mengukur peningkatan proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peningkatan penyelesaian perkara ini diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

### 1.A. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama

dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding.

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding, jumlah perkara perdata Pengadilan Tinggi Manado yang putus tahun 2024 sebanyak 207 perkara dan seluruh perkara perdata yang putus tersebut diselesaikan tepat waktu. **Realisasi sebesar 100% dan melebihi target 95% sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 mencapai 105,26%.**

Bulan	Perkara Perdata yang Putus Tahun 2024	Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu Tahun 2024	Realisasi (%)
Januari	22	22	100
Februari	12	12	100
Maret	15	15	100
April	11	11	100
Mei	16	16	100
Juni	11	11	100
Juli	22	22	100
Agustus	16	16	100
September	20	20	100
Oktober	31	31	100
November	19	19	100
Desember	12	12	100
<b>Jumlah</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	

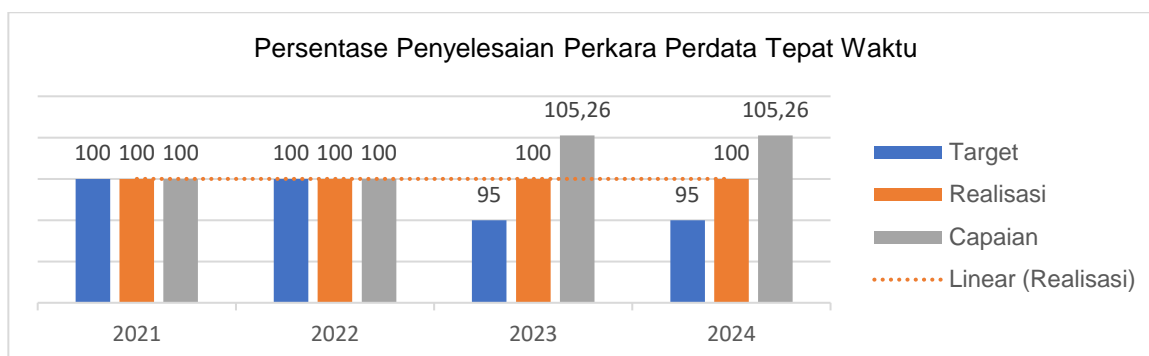
Tabel III.2. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Secara Tepat Waktu Tahun 2024

### Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Sesuai data di tabel, sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Tinggi Manado selalu tepat waktu sehingga realisasi selalu dapat dipertahankan 100%, hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Tinggi Manado selalu berupaya memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian perkara perdata.

Tahun	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
<b>2021</b>	170	170	100	100	100
<b>2022</b>	185	185	100	100	100
<b>2023</b>	221	221	95	100	105,26
<b>2024</b>	207	207	95	100	105,26

Tabel III.3. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024



Grafik III.1. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

**Capaian penyelesaian perkara perdata secara tepat waktu pada tahun 2023 dan 2024 sama – sama sebesar 105,26%, lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun 2021 dan 2022 karena target yang ditetapkan pada tahun 2023 dan 2024 lebih rendah dibandingkan target 2021 dan 2022.**

### 1.B. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding.

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding, jumlah perkara pidana Pengadilan Tinggi Manado yang putus tahun 2024 sebanyak 171 perkara dan seluruh perkara pidana yang putus tersebut diselesaikan tepat waktu. **Realisasi sebesar 100% dan melebihi target 95% sehingga capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 mencapai 105,26%.**

Bulan	Perkara Pidana yang Putus Tahun 2024	Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu Tahun 2024	Realisasi (%)
Januari	11	11	100
Februari	16	16	100
Maret	11	11	100
April	18	18	100
Mei	14	14	100
Juni	9	9	100
Juli	14	14	100
Agustus	10	10	100
September	19	19	100
Oktober	19	19	100

November	13	13	100
Desember	17	17	100
<b>Jumlah</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	

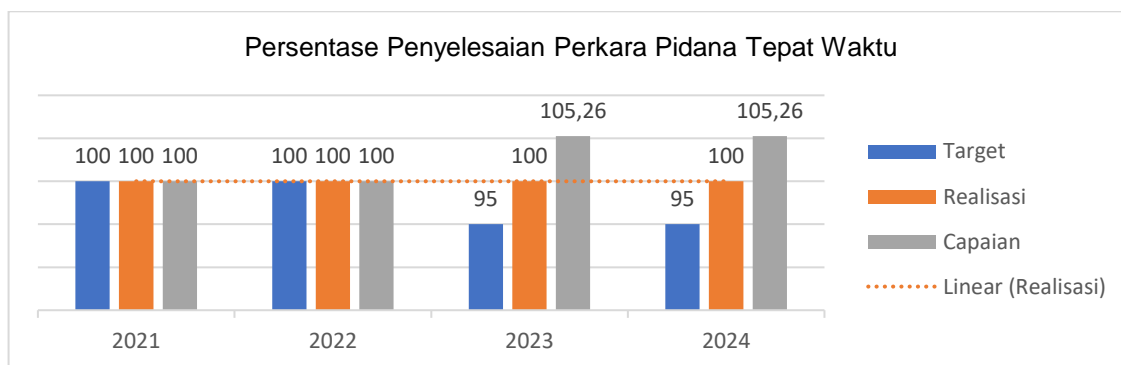
Tabel III.4. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Secara Tepat Waktu Tahun 2024

### Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara pidana yang tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Sesuai data di tabel, sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Tinggi Manado selalu tepat waktu sehingga realisasi selalu dapat dipertahankan 100%, hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Tinggi Manado selalu berupaya memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian perkara pidana.

Tahun	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	150	150	100	100	100
2022	126	126	100	100	100
2023	158	158	95	100	105,26
2024	171	171	95	100	105,26

Tabel III.5. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024



Grafik III.2. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

**Capaian penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu pada tahun 2023 dan 2024 sama – sama sebesar 105,26%, lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun 2021 dan 2022 karena target yang ditetapkan pada tahun 2023 dan 2024 lebih rendah dibandingkan target 2021 dan 2022.**

#### 1.C. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. Perkara pidana khusus yang ditanganani di

Pengadilan Tinggi Manado adalah pidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang waktu penyelesaiannya adalah maksimal 60 hari sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding, jumlah perkara pidana khusus Pengadilan Tinggi Manado yang putus tahun 2024 sebanyak 15 perkara dan seluruh perkara pidana khusus yang putus tersebut diselesaikan tepat waktu. **Realisasi sebesar 100% dan melebihi target 95% sehingga capaian persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 mencapai 105,26%.**

Bulan	Perkara Pidana Khusus yang Putus Tahun 2024	Perkara Pidana Khusus yang Putus Tepat Waktu Tahun 2024	Realisasi (%)
Januari	-	-	100
Februari	-	-	100
Maret	1	1	100
April	-	-	100
Mei	3	3	100
Juni	1	1	100
Juli	1	1	100
Agustus	-	-	100
September	4	4	100
Oktober	5	5	100
November	-	-	100
Desember	-	-	100
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	

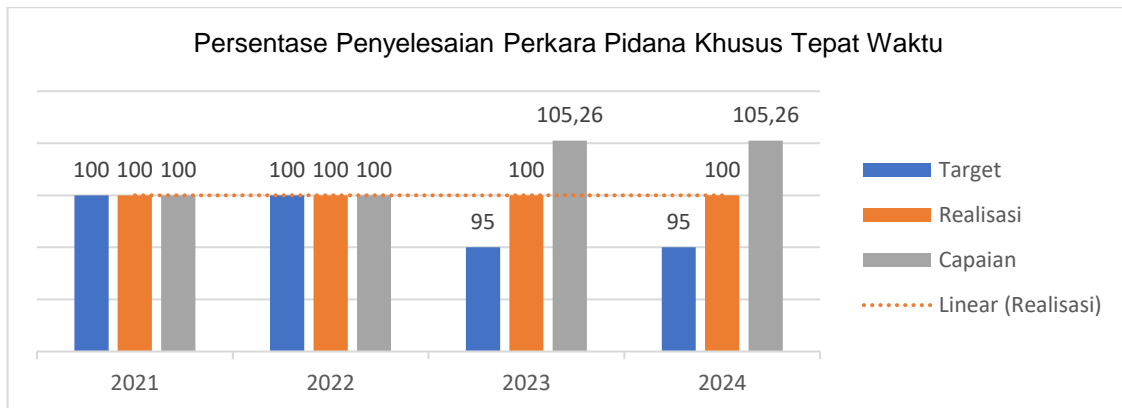
Tabel III.6. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Secara Tepat Waktu Tahun 2024

### Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara pidana khusus yang tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 penyelesaian perkara pidana khusus di Pengadilan Tinggi Manado selalu tepat waktu sehingga realisasi dapat dipertahankan 100%, hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Tinggi Manado selalu berupaya memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian perkara pidana khusus.

Tahun	Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	7	7	100	100	100
2022	7	7	100	100	100
2023	27	27	95	100	105,26
2024	15	15	95	100	105,26

Tabel III.7. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024



Grafik III.3. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

**Capaian penyelesaian perkara pidana khusus secara tepat waktu pada tahun 2023 dan 2024 sama – sama sebesar 105,26%, lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun 2021 dan 2022 karena target yang ditetapkan pada tahun 2023 dan 2024 lebih rendah dibandingkan target 2021 dan 2022.**

#### Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi (%)				Target Jangka Menengah (%)
	2021	2022	2023	2024	
a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	90
b. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	
c. Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	

Tabel III.8. Persentase Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah (Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024) dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara

pada Pengadilan Tinggi Manado selalu tepat waktu sehingga target dapat terpenuhi dan capaian kinerja sebesar  $\geq 100\%$ .

#### **Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata, Pidana dan Pidana Khusus Secara Tepat Waktu**

Keberhasilan kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu dan realisasi kinerja mencapai 100% baik perkara Perdata, Pidana, maupun Pidana Khusus ditunjang oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Pengadilan Tinggi Manado menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Pengadilan Tinggi Manado telah melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
- c. Hakim Tinggi, Panitera Pengganti serta staf pelaksana bidang Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Manado menggunakan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka menertibkan administrasi perkara yang ditangani;
- d. *Monitoring* dan evaluasi kinerja secara berkala oleh Pimpinan serta Hakim Tinggi Pengawas Bidang terhadap penyelesaian perkara;
- e. *Monitoring* dan evaluasi kinerja melalui aplikasi EIS  
EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) merupakan aplikasi berbasis *web* yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terhadap pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum sehingga implementasi SIPP terutama dalam hal kinerja, kepatuhan, kelengkapan dan kesesuaian serta keakuratan dan kualitas data dapat terjamin;
- f. *One Day Minute* dan *One Day Publish* Putusan  
Inovasi tersebut di atas merupakan inovasi meminutasi perkara pada hari yang sama perkara tersebut diputus dan pada hari itu juga putusan di-*publish* ke Direktori Putusan sehingga dalam waktu 1 x 24 jam, putusan tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum;
- g. Pengembangan kompetensi Hakim Tinggi dan Pegawai melalui pembinaan/ pelatihan/ sosialisasi/ bimbingan teknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Manado Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia serta instansi pemerintah lainnya; dan
- h. Hakim dan Pegawai telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan baik serta penuh tanggung jawab.

#### **1.D. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan

perkara. Pada tahun 2024, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 39,18% melebihi target 35% sehingga capaiannya 111,94%.

Semester	Perkara Putus Tahun 2024	Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024
I	171	50
II	222	104
<b>Jumlah</b>	<b>393</b>	<b>154</b>

Tabel III.9. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

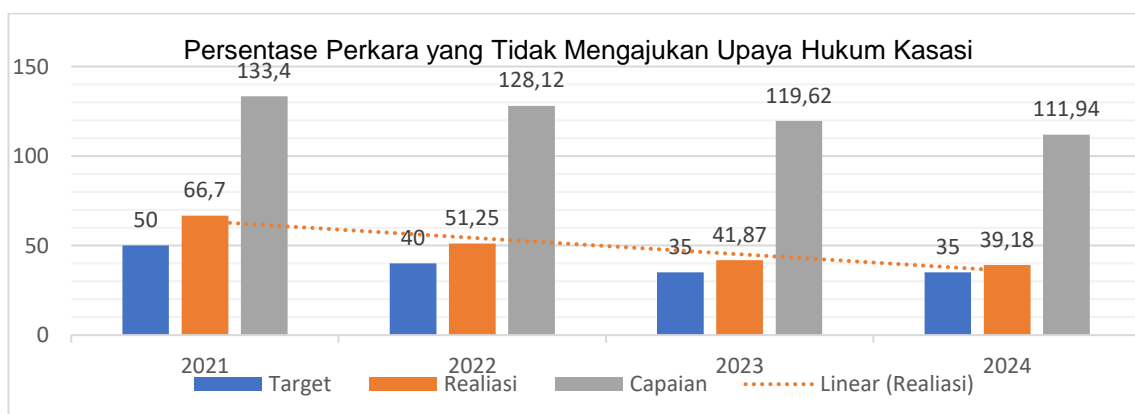
Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

### Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, di mana terjadi penurunan pada realisasi dan capaian setiap tahunnya.

Tahun	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	327	218	50	66,7	133,4
2022	318	163	40	51,25	128,12
2023	406	170	35	41,87	119,62
2024	393	154	35	39,18	111,94

Tabel III.10. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024



Grafik III.4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

## Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi (%)				Target Jangka Menengah (%)
	2021	2022	2023	2024	
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40,5	51,25	41,87	39,18	50

Tabel III.11. Persentase Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Pengadilan Tinggi Manado dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pengadilan Tinggi Manado melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan rapat teknis yang dilaksanakan oleh pimpinan secara periodik. Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan Pengadilan Tinggi Manado.

Selain itu, dalam memutus suatu perkara idealnya semua pihak yang berperkara dapat menerima putusan hakim, sehingga tidak perlu ada upaya hukum kasasi. Adanya upaya hukum kasasi ini dikarenakan tingkat kepuasan tergantung kepada para pencari keadilan, karena rasa keadilan tergantung dari kepuasan para pihak, dan tingkat kepuasan bersifat relatif, sehingga apapun bentuk putusan yang menurut majelis hakim sudah dianggap adil, namun para pihak tetap menyatakan tidak adil.

### 1.E. Index Persepsi *Stakeholder* yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengatur bahwa unsur survei kepuasan masyarakat meliputi :

1. Persyaratan;
2. Prosedur;
3. Waktu pelayanan;

4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; dan
9. Sarana dan Prasarana.

Sedangkan pada SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya, unsur survei

persepsi anti korupsi pada Pengadilan

Tinggi meliputi :

1. Manipulasi Peraturan;
2. Penyalahgunaan Jabatan;
3. Menjual Pengaruh;
4. Transparansi Biaya;
5. Biaya Tambahan;
6. Hadiah;
7. Transparansi Pembayaran;
8. Percaloan;
9. Perbuatan Curang; dan
10. Transaksi Rahasia.

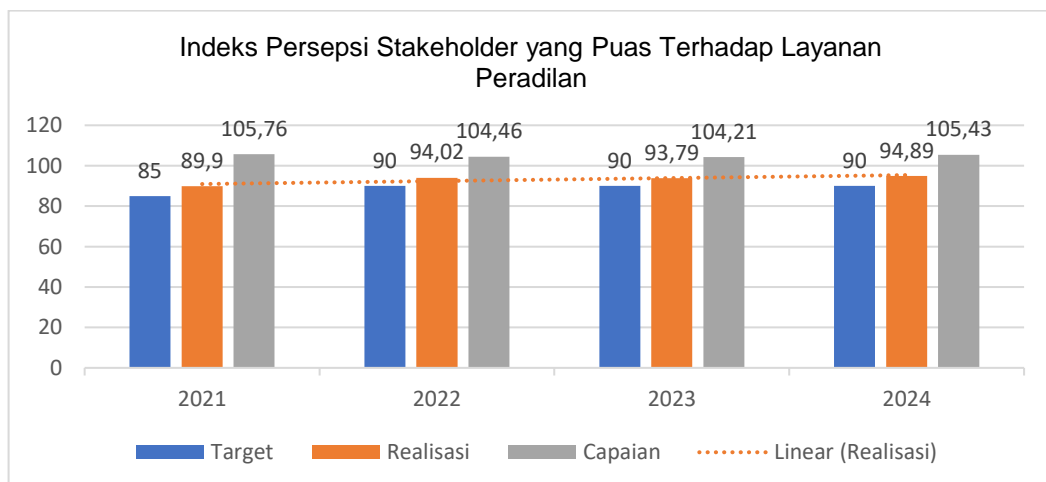
Target untuk indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Tinggi Manado tahun 2024 sebesar 90% dengan realisasi atas indikator tersebut 94,89% yang diperoleh dari total persentase survei kepuasan masyarakat (I,II, III dan IV) kemudian dibagi empat dan survei persepsi anti korupsi (I,II,III,IV) kemudian dibagi empat sehingga capaian melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 105,43%.

Triwulan	Survei Kepuasan Masyarakat (%)	Survei Persepsi Anti Korupsi (%)
I	94,51	95,76
II	93,83	95,53
III	97,22	94,79
IV	95,28	92,21
<b>Jumlah</b>	<b>380,84 : 4</b> <b>95,21</b>	<b>378,29 : 4</b> <b>94,57</b>
<b>Total</b>	<b>(95,21 + 94,57) : 2 = 94,89</b>	

Tabel III.12. Persentase Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi Tahun 2024

### Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian atas indikator kinerja indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan sejak tahun 2021 sampai dengan 2024.



Grafik III.5. Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pada tahun 2021, dari target yang telah ditetapkan sebesar 85%, berdasarkan survei kepuasan yang telah dibuat terhadap pencari keadilan yang datang di Pengadilan Tinggi Manado maka secara total hasil survei adalah 89,90% merasa puas atas layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi

Manado. Sedangkan target untuk indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Tinggi Manado tahun 2022 sebesar 90% dengan realisasi atas indikator tersebut 94,02% sehingga capaian melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 104,46%. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 tetapi tahun 2024 ini terjadi peningkatan menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Manado telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Tinggi Manado semakin meningkat.

### **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator	Realisasi (%)				Target Jangka Menengah (%)
	2021	2022	2023	2024	
Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas terhadap Layanan Peradilan	89,9	94,02	93,79	94,89	90

*Tabel III.13. Persentase Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah*

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah (Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024) bahwa meskipun terjadi penurunan realisasi pada tahun 2023 akan tetapi pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Manado berhasil meningkatkan kinerja pelayanan publik.

### **Keberhasilan Indikator Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Manado, didukung oleh faktor-faktor di bawah ini :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan melalui sosialisasi dan pelatihan pelayanan disabilitas;
- b. Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas;
- c. Optimalisasi inovasi berbasis teknologi informasi yang memudahkan pelayanan publik;
- d. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP; dan
- e. Pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelayanan PTSP yang dilaksanakan secara periodik; dan
- f. Menindaklanjuti 3 (tiga) unsur terendah dalam Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi.

## **2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi pengadilan yang berorientasi pada pelayanan peradilan yang prima. Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan

Tinggi Manado dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peningkatan penyelesaian perkara ini diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditargetkan dengan realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

## 2.A. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata. Total perkara perdata yang diputus tahun 2024 sebanyak 207 dan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu sebanyak 207. **Realisasi sebesar 100% dan melebihi target 95% sehingga capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2024 mencapai 105,26%.**

Pengiriman salinan putusan ke pengadilan Pengaju mengacu pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara dan Surat Edaran No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Bulan	Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Realisasi (%)
Januari	22	22	100
Februari	12	12	100
Maret	15	15	100
April	11	11	100
Mei	16	16	100
Juni	11	11	100
Juli	22	22	100
Agustus	16	16	100
September	20	20	100
Oktober	31	31	100
November	19	19	100
Desember	12	12	100
<b>Jumlah</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	

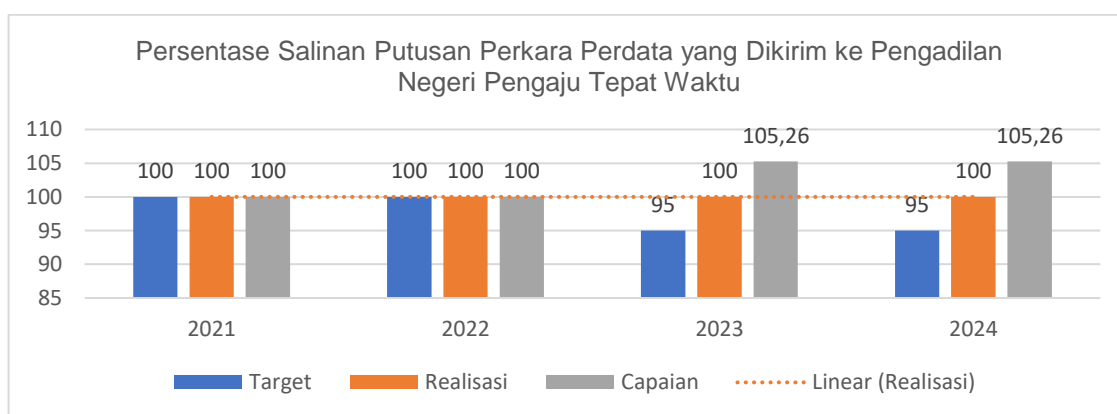
Tabel III.14. Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tahun 2024

## Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja atas indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 :

Tahun	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	Jumlah Seluruh Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	170	170	100	100	100
2022	185	185	100	100	100
2023	221	221	95	100	105,26
2024	207	207	95	100	105,26

Tabel III.15. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024



Grafik III.6. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

**Capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2023 dan 2024 sama – sama sebesar 105,26%, lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun 2021 dan 2022 karena target yang ditetapkan pada tahun 2023 dan 2024 lebih rendah dibandingkan target 2021 dan 2022.** Realisasi indikator kinerja ini selalu tepat waktu dari tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengiriman salinan putusan perkara perdata tepat waktu selalu dipertahankan setiap tahun.

### 2.B. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana. Total perkara pidana yang diputus tahun 2024 sebanyak 171 dan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan

pengaju tepat waktu sebanyak 171. **Realisasi sebesar 100% dan melebihi target 95% sehingga capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2024 mencapai 105,26%.**

Pengiriman salinan putusan ke pengadilan Pengaju mengacu pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasannya Perkara dan Surat Edaran No. 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Bulan	Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Realisasi (%)
Januari	11	11	100
Februari	16	16	100
Maret	11	11	100
April	18	18	100
Mei	14	14	100
Juni	9	9	100
Juli	14	14	100
Agustus	10	10	100
September	19	19	100
Oktober	19	19	100
November	13	13	100
Desember	17	17	100
<b>Jumlah</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	

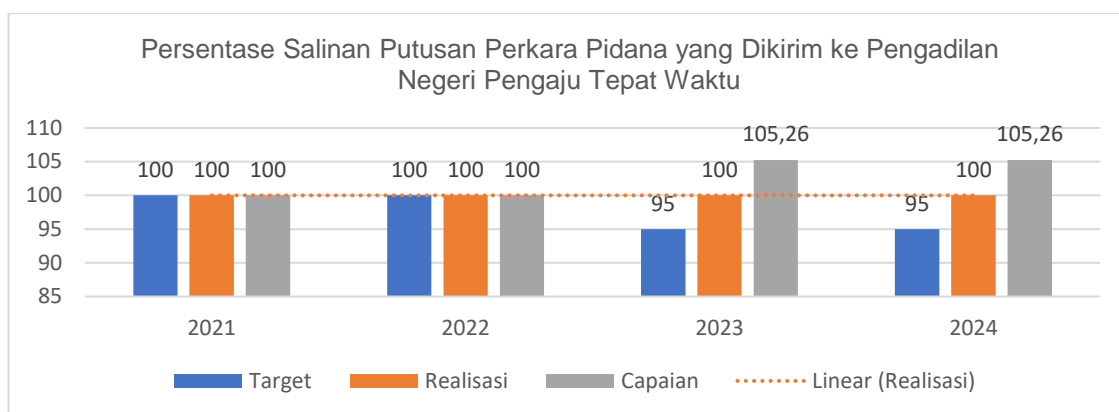
Tabel III.16. Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tahun 2024

### Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja atas indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 :

Tahun	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
<b>2021</b>	150	150	100	100	100
<b>2022</b>	126	126	100	100	100
<b>2023</b>	158	158	95	100	105,26
<b>2024</b>	171	171	95	100	105,26

Tabel III.17. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024



Grafik III.7. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

**Capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2023 dan 2024 sama – sama sebesar 105,26%, lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun 2021 dan 2022 karena target yang ditetapkan pada tahun 2023 dan 2024 lebih rendah dibandingkan target 2021 dan 2022.** Realisasi indikator kinerja ini selalu tepat waktu dari tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana tepat waktu selalu dipertahankan setiap tahun.

### 2.C. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana khusus. Total perkara pidana yang diputus tahun 2024 sebanyak 15 dan jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu sebanyak 15. **Realisasi sebesar 100% dan melebihi target 95% sehingga capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2024 mencapai 105,26%.**

Bulan	Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Realisasi (%)
Januari	-	-	100
Februari	-	-	100
Maret	1	1	100
April	-	-	100
Mei	3	3	100
Juni	1	1	100
Juli	1	1	100
Agustus	-	-	100
September	4	4	100
Oktober	5	5	100

November	-	-	100
Desember	-	-	100
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	

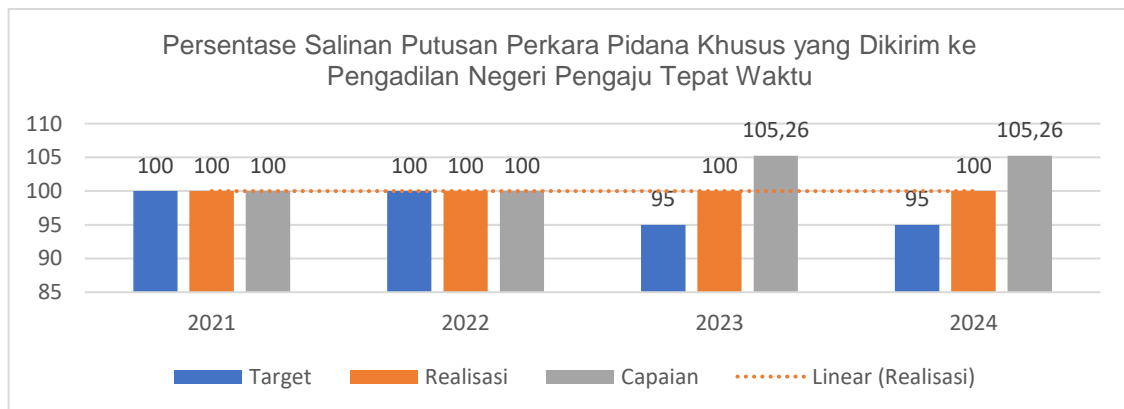
Tabel III.18. Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tahun 2024

### Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut tabel dan grafik yang menunjukkan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja atas indikator persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 :

Tahun	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2021	7	7	100	100	100
2022	7	7	100	100	100
2023	27	27	95	100	105,26
2024	15	15	95	100	105,26

Tabel III.19. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024



Grafik III.8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Secara Tepat Waktu Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

**Capaian persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2023 dan 2024 sama – sama sebesar 105,26%, lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun 2021 dan 2022 karena target yang ditetapkan pada tahun 2023 dan 2024 lebih rendah dibandingkan target 2021 dan 2022.** Realisasi indikator kinerja ini selalu tepat waktu dari tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus tepat waktu selalu dipertahankan setiap tahun.

## Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator	Realisasi (%)				Target Jangka Menengah (%)
	2021	2022	2023	2024	
a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	100	100	100	90
b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	100	100	100	
c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	100	100	100	

Tabel III.20. Persentase Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah (Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024) dapat disimpulkan bahwa pengiriman salinan putusan perkara pada Pengadilan Tinggi Manado selalu tepat waktu sehingga target dapat terpenuhi dan capaian kinerja sebesar  $\geq 100\%$ .

### Keberhasilan Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata, Pidana dan Pidana Khusus Secara Tepat Waktu

Pada tahun 2024, capaian kinerja indikator pengiriman Salinan putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu baik untuk perkara Perdata, Pidana, dan Pidana Khusus adalah sebesar 100%. Faktor pendukung dalam capaian ini adalah :

- a. Implementasi regulasi pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju berdasarkan :
  - Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan;
  - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara; dan
  - SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan Badilum melalui SK No.21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- b. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Manado didalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam pengiriman salinan putusan; dan
- c. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik.

### Perbandingan Capaian Kinerja di Level Nasional

Berikut rekapitan data capaian kinerja nasional lingkup pengadilan tinggi pada peradilan umum tahun 2024, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Rata-Rata	
			Realisasi Per Indikator (%)	Capaian Per Indikator (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	99,58	102,42
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	99,42	102,05
		Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	99,44	101,92
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	47,43	118,80
		Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97,34	105,48
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	99,88	101,48
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	99,97	101,67
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	99,49	101,15

Tabel III.21. Rekapitan Data Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024

REKAPAN DATA CAPAIAN KINERJA NASIONAL LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN 2024

No	Satuan Kerja	Strategi 1: Terealisasi Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel												Strategi 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pengelolaan Perkara												KATEGORI PENGADILAN								
		Indikator Kinerja																																
		Persentase Perkara Perdata yang Disediakan Tepat Waktu				Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat Waktu				Persentase perkara Pidana Khusus yang Disediakan Tepat Waktu				Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi Hakim Kasasi				Indeks Percepatan Sektoral yang Penuh Terhadap Layanan Peradilan				Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu					Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu				Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikal yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian	Jumlah Perkara				
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	99	97,82	99,91	99	100	100,34	99	100	102,94	40	52,73	131,03	99	97,67	109,74	99	100	101,21	99	100	101,81	99	100	101,21	301-1000 Perkara								
2	Pengadilan Tinggi Makassar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	40,58	103,3	99	99,99	103,05	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	301-1000 Perkara							
3	Pengadilan Tinggi Denpasar	99	99,9	100,05	99	100	100,26	99	100	100,28	30	40,4	110,49	99	97,3	109,11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	301-1000 Perkara							
4	Pengadilan Tinggi Riau	97	100	103,09	97	100	100,39	100	100	100	40	41,79	104,48	97	99,88	102,97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	301-1000 Perkara							
5	Pengadilan Tinggi Jambi	99	99,4	103,94	99	100	102,34	99	100	104,17	39	39,38	109,69	99	99,2	109,77	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	301-1000 Perkara							
6	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	40,58	109,7	99	99,97	111,09	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	301-1000 Perkara							
7	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	100	99,25	99,28	100	100	100	100	100	100	40	49,33	113,32	99	99,94	99,73	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	< 300 Perkara							
8	Pengadilan Tinggi Anbar	99	99	100	99	91	85,79	95	100	105,28	39	72	209,74	99	99,13	104,35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	< 300 Perkara							
9	Pengadilan Tinggi Banten	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	49	104,99	99,5	99,24	109,24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	301-1000 Perkara							
10	Pengadilan Tinggi Bengkulu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	47,59	119,73	99	99,63	109,29	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	< 300 Perkara							
11	Pengadilan Tinggi Bengkulu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	28	27,9	107,24	99	99,99	101,02	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	< 300 Perkara							
12	Pengadilan Tinggi Bandung	100	100	100	100	100	100	100	100	100	33,75	33,99	100,47	99	99,49	113,24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	> 1000 Perkara							
13	Pengadilan Tinggi Makassar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40	49,29	109,64	99	99,19	109,21	99	100	100,29	99	99,29	104,47	99	99,19	99,99	100	< 1000 Perkara							
14	Pengadilan Tinggi Surabaya	97	99,21	102,29	97	99,8	100,99	97	100	102,99	50	52,47	107,45	99	97,5	99,49	99	99,9	100,91	99	100	101,81	99	100	101,21	> 1000 Perkara								
15	Pengadilan Tinggi Manado	99	100	109,29	99	100	109,29	99	100	109,29	39	39,19	111,04	99	99,99	109,43	99	100	109,29	99	100	109,29	99	100	109,29	301-1000 Perkara								
16	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	99	100	109,29	99	100	109,29	99	100	109,29	50	59,27	110,54	99	99,34	104,57	99	100	109,29	99	100	109,29	99	100	109,29	< 1000 Perkara								
17	Pengadilan Tinggi Papua Barat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80,29	80,29	99	99,09	109,1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	< 300 Perkara							
18	Pengadilan Tinggi Medan	99	100	113,64	94	100	109,35	97	100	109,99	29	29,31	101,07	99	99,63	109,24	99	100	102,64	99	100	104,17	99	100	104,17	> 1000 Perkara								
19	Pengadilan Tinggi Palembang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	29	29,9	131,2	99	99,5	109,65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	< 300 Perkara							
20	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	99	97	104,3	99	99	100	99	100	107,93	49	49	109,67	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	301-1000 Perkara							
21	Pengadilan Tinggi Jababud	99	100	104,17	99	100	104,17	99	100	104,17	49	59,49	129,03	99	99,74	109,15	99	100	109,29	99	100	104,17	99	100	109,29	< 300 Perkara								
22	Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau	99	100	117,89	99	100	117,89	99	100	117,89	49	59,12	129,3	99	99,72	109,09	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	< 300 Perkara							
23	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	91,59	99,07	99	97,94	101,6	100	100	99,94	99,94	99,94	100	100	100	100	100	< 300 Perkara							
24	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	100	100	100	100	100	100	100	100	100	24	29,49	110,09	99	99,99	119,45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	301-1000 Perkara							
25	Pengadilan Tinggi Pontianak	99	100	104,17	99	100	104,17	99	100	104,17	24	29,17	109,38	99	99,39	104,59	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	301-1000 Perkara							
26	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	100	100	100	100	100	100	100	100	100	27,5	47	129,39	99	103,09	109,69	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	301-1000 Perkara							
27	Pengadilan Tinggi Palembang	100	99,29	99,29	100	100	100	100	100	100	99	49,01	99,99	99	99,91	109,09	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	301-1000 Perkara							
28	Pengadilan Tinggi Padang	100	99,91	99,91	100	100	100	100	100	100	29	29,09	107,94	99	99,63	110,7	99	100	111,11	99	100	111,11	99	100	111,11	100	301-1000 Perkara							
29	Pengadilan Tinggi Jakarta	99	99,21	102,67	99	99,49	100,99	99	100	104,17	52	24,57	102,03	99	99	109,59	99	97,29	102,37	99	99,72	107,29	99	99,99	109,29	> 1000 Perkara								
30	Pengadilan Tinggi Banda	99	100	111,11	99	100	111,11	99	100	111,11	39	49	133,33	99	99,92	107,59	99	100	111,11	99	100	111,11	99	100	111,11	< 300 Perkara								
31	Pengadilan Tinggi Padang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	49	59	104,49	99	99,99	112,41	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	301-1000 Perkara							
32	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	99	100	101,29	99	100	101,29	99	100	102,94	52	59,99	119,21	99	97,94	109,71	99	100	102,94	99	100	102,94	99	100	102,94	< 300 Perkara								
33	Pengadilan Tinggi Gorontalo	100	100	100	100	100	100	100	100	100	49	37	217,9	109	99,49	99,49	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	< 300 Perkara							
34	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	29,33	49,2	102,21	99	99,99	102,11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	< 300 Perkara							
	<b>Rata-rata</b>	<b>97,39</b>	<b>99,99</b>	<b>102,42</b>	<b>97,39</b>	<b>99,49</b>	<b>102,99</b>	<b>97,71</b>	<b>99,49</b>	<b>101,92</b>	<b>49,39</b>	<b>47,99</b>	<b>119,03</b>	<b>99,8</b>	<b>97,24</b>	<b>109,49</b>	<b>99,9</b>	<b>99,99</b>	<b>101,49</b>	<b>99,91</b>	<b>99,97</b>	<b>101,67</b>	<b>99,47</b>	<b>99,49</b>	<b>101,59</b>									

Gambar III.1. Rekapitan Data Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2024

Pengadilan Tinggi Manado juga membandingkan capaian kinerja dengan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang sama-sama Pengadilan Tinggi Tipe B dengan kategori pengadilan 300-1000 perkara. Berikut perbandingan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2024 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Per Indikator	
			PT Manado (%)	PT Kaltim (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	105,26	100
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	105,26	100
		Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	105,26	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	111,94	113,03
		Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	105,43	116,45
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	105,26	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	105,26	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	105,26	100

Tabel III.22. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Tahun 2024

Perhitungan capaian kinerja tidak hanya dilakukan dengan membandingkan antar tahun saja, tapi capaian kinerja dapat dikatakan lebih berhasil jika mampu disandingkan dengan level nasional. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado telah mampu bersaing dengan Pengadilan Tinggi lain, jika dibandingkan dengan rekapan data capaian kinerja Pengadilan Tinggi pada Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi Manado telah berhasil meraih capaian di atas 100%, artinya realisasi kinerja di atas target yang telah ditetapkan. Dengan capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi Manado mampu memberikan dampak positif dalam efektifitas dan efisiensi pelayanan peradilan.

## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran pemanfaatan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit pemanfaatan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimal. Pengadilan Tinggi Manado telah memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efisien.

### A. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Manado tetap konsisten dalam efisiensi pemanfaatan SDM hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti), hal ini dapat dilihat realisasi penyelesaian perkara tetap dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Pada tahun 2024, terjadi mutasi keluar 3 (tiga) Hakim sedangkan mutasi masuk sebanyak 6 (enam) Hakim. Sedangkan panitera muda/panitera pengganti yang memasuki masa pensiun pada tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) dan mutasi masuk sebanyak 2 (dua) panitera pengganti. Keberhasilan tersebut menunjukkan pengelolaan manajemen penyelesaian perkara yang baik dengan mengacu secara konsistensi menjalankan SOP penyelesaian perkara yang berimplikasi positif terhadap penyelesaian perkara tepat waktu di Pengadilan Tinggi Manado.

### B. Sumber Daya Anggaran

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1). Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	95	100	105,26%
- Pidana	95	100	105,26%
- Pidana Khusus	95	100	105,26%
2). Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	35	39,18	111,94%
3). Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	94,89	105,43%
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>	<b>82</b>	<b>86,81</b>	<b>106,63%</b>
<b>Rata-rata capaian kinerja keuangan</b>	<b>17.597.069.000</b>	<b>17.361.833.163</b>	<b>98,66%</b>
Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1). Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu			
- Perdata	95	100	105,26%
- Pidana	95	100	105,26%
- Pidana Khusus	95	100	105,26%
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>105,26%</b>
<b>Rata-rata capaian kinerja keuangan</b>	<b>188.206.000</b>	<b>187.401.760</b>	<b>99,57%</b>

Tabel III.23. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Kriteria : Capaian kinerja < capaian realisasi anggaran, disimpulkan bahwa kegiatan penanganan perkara tidak efisien.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya anggaran pada Pengadilan Tinggi Manado pada tahun 2024 adalah efisien karena seluruh target kinerja pada 2024 telah tercapai dengan realisasi anggaran 98,66% untuk DIPA 01 dan 99,57% untuk DIPA 03.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan Keuangan adalah kegiatan mengelola anggaran yang telah dianggarkan Mahkamah Agung untuk Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Manado dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado sangat ditunjang oleh Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada DIPA (03) dan dan Program Dukungan Manajemen DIPA (01).

### DIPA (01)

Pada awal tahun 2024, Pengadilan Tinggi Manado mendapatkan Pagu Anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 21.663.819.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan seiring berjalannya tahun anggaran 2024 dilakukan revisi dengan pengurangan belanja pegawai (ditarik kembali oleh eselon 1) sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Akan tetapi menjelang akhir tahun anggaran 2024 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Manado memperoleh tambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 422.250.000,- (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anggaran belanja tambahan untuk melaksanakan bimbingan teknis BMN sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang kemudian dilakukan revisi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dialihkan ke belanja barang operasional sehingga pagu anggaran Pengadilan Tinggi Manado Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp 17.597.069.000,- (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu rupiah), sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini

No.	Pagu Anggaran (Semula)	(+/-)	Pagu Anggaran (Menjadi)	Keterangan
1	21.663.819.000	(1.500.000.000)	20.163.819.000	Penarikan belanja pegawai
2	20.163.819.000	(3.000.000.000)	17.163.819.000	Penarikan belanja pegawai
3	17.163.819.000	11.000.000	17.174.819.000	Penambahan anggaran untuk bimtek
4	17.174.819.000	422.250.000	17.597.069.000	Penambahan belanja pegawai
<b>Pagu Anggaran (Akhir)</b>			<b>17.597.069.000</b>	

Tabel III.24. Pagu Anggaran DIPA (01) Tahun Anggaran 2024

Rincian Pagu Anggaran DIPA (01) Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Tinggi Manado :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur.

b. Belanja Barang

Belanja barang terdiri dari:

- Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.

- Belanja Barang Non Operasional

Belanja barang non operasional adalah pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	14.146.677.000	13.983.078.010	98,84	163.598.990
2	Belanja Barang Operasional	3.441.392.000	3.370.235.153	97,93	71.156.847
3	Belanja Barang Non Operasional	9.000.000	8.520.000	94,67	480.000
<b>TOTAL</b>		<b>17.597.069.000</b>	<b>17.361.833.163</b>	<b>98,66</b>	<b>235.235.837</b>

Tabel III.25. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja DIPA (01) Tahun Anggaran 2024

No	Tahun	DIPA	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	DIPA (01)	22.264.251.000	21.737.091.432	97,63
2	2022	DIPA (01)	22.552.853.000	21.930.802.000	97,24
3	2023	DIPA (01)	19.523.022.000	19.324.650.115	98,98
4	2024	DIPA (01)	17.597.069.000	17.361.833.163	98,66

Tabel III.26. Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024



Berdasarkan data pada grafik, realisasi anggaran DIPA (01) pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 secara berturut-turut adalah 97,63%; 97,24%; 98,98%; dan 98,66%. Meskipun terjadi penurunan realiasi anggaran pada tahun 2024, karena adanya kelebihan belanja pegawai, Pengadilan Tinggi Manado telah menunjukkan bahwa terdapat upaya mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Grafik III.9. Persentase Realisasi Anggaran DIPA (01) Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

### DIPA (03)

Pada tahun 2024, Pengadilan Tinggi Manado mendapatkan Pagu Anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum Rp 193.775.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sehubungan dengan adanya penghematan anggaran belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan pemblokiran perjalanan dinas sebesar Rp 5.569.000,- (lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

No.	Pagu Anggaran (Semula)	(+/-)	Pagu Anggaran (Menjadi)	Keterangan
1	193.775.000	(5.569.000)	188.206.000	Pemblokiran belanja perjalanan dinas
<b>Pagu Anggaran (Akhir)</b>			<b>188.206.000</b>	

Tabel III.27. Pagu Anggaran DIPA (03) Tahun Anggaran 2024

Rincian Pagu Anggaran DIPA (03) Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Tinggi Manado :

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Barang Operasional	188.206.000	187.401.760	99,57	804.240

Tabel III.28. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja DIPA (03) Tahun Anggaran 2024

No	Tahun	DIPA	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	DIPA (03)	422.560.000	393.384.200	93,10
2	2022	DIPA (03)	296.556.000	294.593.258	99,33
3	2023	DIPA (03)	203.375.000	196.004.413	96,38
4	2024	DIPA (03)	188.206.000	187.401.760	99,57

Tabel III.29. Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024



Berdasarkan data pada grafik, realisasi anggaran DIPA (03) pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 secara berturut-turut adalah 93,1%; 99,33%; 96,38%; dan 99,57%. Data ini menunjukkan realisasi anggaran pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Tinggi Manado berupaya untuk meningkatkan realisasi anggaran guna mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Grafik III.10. Persentase Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

### **Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Manado didukung oleh Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen.

#### **1. Program Dukungan Manajemen**

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya sasaran strategis **terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**. Meskipun pada tahun 2024 tidak mendapatkan anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Manado berhasil mempertahankan kinerja dalam penyelesaian perkara secara tepat waktu, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta realisasi atas perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi masih lebih besar daripada target yang sudah ditentukan. Capaian – capaian tersebut didukung dengan tersedianya anggaran pada Kegiatan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, sebagai berikut :

Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran
17.597.069.000	17.361.833.163 (98,66%)

#### **2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Manado yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum untuk mendukung tercapainya sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Pengadilan Tinggi Manado berhasil mempertahankan kinerja dalam pengiriman salinan putusan perkara kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu. Keberhasilan ini didukung oleh anggaran sebagai berikut :

Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran
188.206.000	187.401.760 (99,57%)



## **BAB IV PENUTUP**

- **KESIMPULAN**
- **REKOMENDASI**

## **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2024 menyajikan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis. Dua sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian sebesar 106,65% untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dan sebesar 105,26% untuk Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”. Sedangkan rata-rata capaian secara keseluruhan sebesar **105,95%**.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan capaian kinerja yang tertuang secara transparan dan akuntabel dapat menjadi acuan atau patokan dalam pencapaian kinerja di tahun-tahun berikutnya. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar 98,66%, dan anggaran dari DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar 99,57%.

Keberhasilan capaian tersebut tentunya karena Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik serta didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang. Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah nihil, semua pencapaian sudah maksimal. Capaian yang diperoleh sudah sesuai bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

Belum ada kendala yang terlalu menonjol, mengingat capaian sudah sesuai bahkan melebihi target. Kendala yang masih menjadi kekurangan yaitu Pengadilan Tinggi Manado masih memerlukan tambahan anggaran khususnya :

1. pembangunan ruang arsip,
2. pengadaan perangkat alat pengolah data dan komunikasi PTSP; dan
3. anggaran pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Pengadilan Tinggi Manado juga berupaya meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap. Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

## **B. REKOMENDASI**

Untuk melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Tinggi Manado maka :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar subbagian/unit kerja pada Pengadilan Tinggi Manado;
2. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan;
3. Penguatan pengawasan internal dan eksternal; dan
4. Penguatan kualitas dan integritas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat; dan
5. Peningkatan sarana prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

## LAMPIRAN



**KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO  
NOMOR : 153 /KPT.W19-U/SK.OT1.6/II/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

**KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
  - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
  9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado tanggal 18 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado;

MEMUTUSKAN ...

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Manado dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Manado agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 13 Februari 2024



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PENGADILAN TINGGI MANADO

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu x 100%</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi x 100%</u>          Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Index Persepsi Kepuasan <i>Stakeholder</i></p> </div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> <li>• Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IPAK Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>	<p>Panitera dan Sekretaris</p>	<p>Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan</p>

2	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> <li>- Pidana Khusus (Tipikor)</li> </ul>	<p><u>Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Tepat Waktu x 100</u>          Jumlah keseluruhan yang dikirim</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Dirjen Badlitum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
---	---	---	--	----------	-------------------------------------

**KAMUS IKU  
 PENGADILAN TINGGI MANADO**

**IKU 1 :**

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.
Formula Perhitungan	<b>(A/B) * 100%</b>
	A = Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
	B = jumlah perkara perdata yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk                      50 – 70% Baik                      >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

**IKU II :**

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.
Formula Perhitungan	<b>(A/B) * 100%</b>
	A = Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
	B = jumlah perkara pidana yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk                      50 – 70% Baik                      >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu ;</li> <li>2. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan</li> </ol>

**IKU III :**

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.
Formula Perhitungan	<b>(A/B) * 100%</b> A = Jumlah perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu B = jumlah perkara tipikor yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk                      50 – 70% Baik                      >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu; 2. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

**IKU IV :**

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Yang Tidak Mergajukan Upaya Hukum Kasasi
Definisi	Mengukur jumlah perkara banding yang tidak mengajukan kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Kasasi dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Formula Perhitungan	<b>(A/B) * 100%</b>
	A = jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding
	B = jumlah perkara yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk                      50 – 70% Baik                      >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

#### IKU V :

Kamus IKU	
Nama IKU	Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
Definisi	<p>Mengukur mutu kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi dalam memberikan pelayanan publik kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Variabel pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana.</p> <p>Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.</p> <p>Variabel pengukurannya adalah: manipulasi peraturan, penyalahgunaan jabatan, menjual pengaruh, transparansi biaya, biaya tambahan, hadiah, percaloan, perbuatan curang dan transaksi rahasia</p>
Formula Perhitungan	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Hasil survey yang dilakukan melalui aplikasi SiSUPER
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Survey
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk                      50 – 70% Baik                      >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera dan Sekretaris
KPI Terkait	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 3. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

#### IKU VI :

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
Definisi	Mengukur jumlah Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
Formula Perhitungan	<b><math>(A/B) * 100\%</math></b> A= jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pengadilan pengaju tepat waktu B= jumlah keseluruhan salinan putusan perkara perdata yang dikirim
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara

Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk      50 – 70% Baik      >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

#### IKU VII :

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
Definisi	Mengukur jumlah Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
Formula Perhitungan	<b><math>(A/B) * 100\%</math></b> A= jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pengadilan pengaju tepat waktu B= jumlah keseluruhan salinan pidana perkara perdata yang dikirim
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk      50 – 70% Baik      >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Perkara pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

**IKU VIII :**

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
Definisi	Mengukur jumlah Salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
Formula Perhitungan	<b>(A/B) * 100%</b>
	A= jumlah salinan putusan perkara tipikor yang dikirim kepada pengadilan pengaju tepat waktu
	B= jumlah keseluruhan salinan pidana perkara tipikor yang dikirim
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk                      50 – 70% Baik                      >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Perkara tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

## Sumber Data (Dasar Hukum) :

1. SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penetapan Indikator Kinerja (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO**  
**NOMOR : 29 /KPT.W19-U/SK.OT1.6/I/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

**KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
  8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO;**

- KESATU** : Membentuk TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA Pengadilan Tinggi Manado dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Manado.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Manado Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 10 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Manado,



**Lampiran I**

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Nomor : 29 /KPT.W19-U/SK.OT1.6/I/2024

Tanggal : 10 Januari 2024

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Asli Ginting, S.H.,M.H.
2.	Penanggung Jawab	Danardono, S.H.,M.H.
3.	Pengarah	Jabal Nur As, S.Sos.,M.H.
4.	Koordinator	Arwin, S.H.
5.	Sekretaris	Shabira Chairunnisa, A.Md.
6.	Anggota	Oelfa Grace Safari, S.H.
7.	Sekretariat	1. Asri Maulina Siahaan, S.Sos. 2. Rizki Amelia, S.E.

Ketua Pengadilan Tinggi Manado,



ASLI GINTING

## RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

### PENGADILAN TINGGI MANADO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	95%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35%
		c. Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	95%

Manado, 18 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Manado



ASLI GINTING, S.H.,M.H.

NIP. 19580404 198403 1 002

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI MANADO



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASLI GINTING, S.H.,M.H.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **H. BAMBANG MYANTO, S.H.,M.H.**  
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, 10 Januari 2024

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tinggi Manado



**ASLI GINTING, S.H.,M.H.**  
NIP. 19580404 198403 1 002

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



**H. BAMBANG MYANTO, S.H.,M.H.**  
NIP. 19680523 199212 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	95%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35%
		c. Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	95%

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 21.663.819.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 193.775.000,-

Manado, 10 Januari 2024

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



**H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19680523 199212 1 002

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tinggi Manado



**ASTI SINTING, S.H., M.H.**  
NIP. 19580404 198403 1 002

---

## MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 TRIWULAN I PENGADILAN TINGGI MANADO



**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 TRIWULAN I  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105,26%

NO	INDIKATOR	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>a.Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan; dan</p> <p>b.Melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan sedangkan rata – rata penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Manado 2 (dua) bulan;</li> <li>- Hakim Tinggi Pengawas Bidang melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara rutin pada subbag/unit yang diawasi;</li> <li>- Rapat Teknis antara Pimpinan dengan Hakim Tinggi untuk membahas teknis penyelesaian perkara;</li> <li>- Rapat Teknis antara Panitera Pengadilan Tinggi Manado dengan Panitera dan Panitera Muda pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado;</li> <li>- Rapat Teknis Pimpinan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado dengan Hakim, Panitera dan Unit Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado;</li> <li>- Melaksanakan monitoring dan evaluasi akurasi dan kualitas data SIPP Pengadilan Tinggi Manado; dan</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan oleh Ketua/Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepatuhan dalam penetapan hari sidang, input penetapan hari sidang, input pertimbangan hubungan dan input putusan pada aplikasi SIPP masih ada yang belum sesuai; dan</li> <li>- Presentase dokumen elektronik yang diunggah ke SIPP Banding dengan yang masuk ke direktori putusan masih ada yang belum sesuai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan hari sidang dan input pada aplikasi SIPP tetap dilaksanaka meskipun sudah melewati jangka waktu yang sudah ditetapkan;</li> <li>- Jika putusan tidak <i>upload</i> pada direktori putusan karena jaringan internet, minutasi tetap dilaksanakan; dan</li> <li>- Pembinaan oleh Pimpinan saat rapat monitoring dan evaluasi bulanan; dan</li> <li>- Pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada unit terkait.</li> </ul>

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95%	100%	105,26%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	<p>a. Melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badlum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; dan</p> <p>b. Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	<p>- Pada triwulan I pengiriman salinan putusan perkara ke Pengadilan Pengadilan Negeri Pengaju dilaksanakan secara tepat waktu; dan</p> <p>- Melaksanakan Keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p>	Tidak ada permasalahan	-

Manado, 23 April 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Manado





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kimia Atas, Kecamatan Mapangget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

---

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2024**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kimu Atas, Kecamatan Mngangget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomsri@gmail.com](mailto:ptmanadomsri@gmail.com)

**PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		
				Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	49	49 100,00%	105,26
2.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	1	1 100,00%	105,26
3.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	38	38 100,00%	105,26
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95	1	1 100,00%	105,26
5.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu		38	38 100,00%	0,00
6.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	95	49	49 100,00%	105,26



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kina Atas, Kecamatan Mapangget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

**PENJELASAN**

**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Indikator : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur capaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	49	49 (100%)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Khusus untuk perkara tipikor, penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain melaksanakan penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapangget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

Indikator : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur capaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	38	38 (100 %)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Khusus untuk perkara tipikor, penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanademari@gmail.com](mailto:ptmanademari@gmail.com)

Indikator : Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur capaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	1	1 (100%)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Khusus untuk perkara tipikor, penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Indikator ini mengukur salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	95	49	49 (100 %)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kms Atas, Kecamatan Mapangget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator ini mengukur capaian salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu		38	38 (100%)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator ini mengukur capaian salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95	1	1 (100%)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.

---

## MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 TRIWULAN II PENGADILAN TINGGI MANADO



**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 TRIWULAN II**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105,26%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi <sup>1</sup>	35%	29,24%	83,54%
		c. Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan <sup>2</sup>	90%	94,9%	105,45%

NO	INDIKATOR	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>a.Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan; dan</p> <p>b.Melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan sedangkan rata – rata penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Manado 2 (dua) bulan;</li> <li>- Hakim Tinggi Pengawas Bidang melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara rutin pada subbag/unit yang diawasi;</li> <li>- Rapat Teknis antara Pimpinan dengan Hakim Tinggi untuk membahas teknis penyelesaian perkara;</li> <li>- Rapat Teknis antara Panitera Pengadilan Tinggi Manado dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih ada ketidakpatuhan dalam : input pendaftaran perkara banding (1 perkara), penetapan Majelis Hakim/Hakim (2 perkara), waktu input penetapan Hari Sidang (3 perkara) dan waktu input putusan (1 perkara); dan</li> <li>- Presentase dokumen elektronik yang diunggah ke SIPP Banding dengan yang masuk ke direktori putusan masih ada yang belum sesuai (3 perkara).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penginputan pendaftaran perkara banding, penetapan Majelis Hakim/Hakim, penetapan hari sidang dan input putusan pada aplikasi SIPP tetap dilaksanakan meskipun sudah melewati jangka waktu yang sudah ditetapkan;</li> <li>- Jika putusan tidak ter-<i>upload</i> pada direktori putusan karena jaringan internet, minutasi tetap dilaksanakan; dan</li> <li>- Pembinaan oleh Pimpinan saat rapat monitoring dan evaluasi bulanan; dan</li> <li>- Pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada unit terkait.</li> </ul>

<sup>1</sup> Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di atas merupakan realisasi dan capaian pada Periode Semester I Tahun 2024

<sup>2</sup> Indeks Persepsi *Stakeholder* yang Puas Terhadap Layanan Peradilan merupakan realisasi dan capaian pada Periode Triwulan I dan II Tahun 2024

			<p>Panitera dan Panitera Muda pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Teknis Pimpinan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado dengan Hakim, Panitera dan Unit Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado;</li> <li>- Melaksanakan monitoring dan evaluasi akurasi dan kualitas data SIPP Pengadilan Tinggi Manado; dan</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan oleh Ketua/Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.</li> </ul>		
	<p>b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p>	<p>a. Melaksanakan pendataan perkara perdata, pidana dan pidana khusus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;</p> <p>b. Peningkatan kualitas putusan yang memberikan rasa keadilan/kepuasan pada masyarakat; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepaniteraan Hukum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado.</li> <li>- Rapat Teknis antara Pimpinan dengan Hakim Tinggi untuk membahas teknis penyelesaian perkara.</li> </ul>	<p>Tidak ada permasalahan</p>	<p>-</p>

		c. Pengembangan kompetensi Hakim melalui diklat, bimbingan teknis, sosialisasi dalam penanganan dan penyelesaian perkara.	- Hakim Tinggi mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi melalui diklat, bimbingan teknis, sosialisasi dalam penanganan dan penyelesaian perkara.		
	a. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada Petugas PTSP; b. Menindaklanjuti tiga unsur terendah dalam Survey Kepuasan Masyarakat; dan c. Memberikan penghargaan/ <i>reward</i> secara periodik kepada Petugas PTSP terbaik.	- Penanggung Jawab PTSP melaksanakan pembinaan kepada Petugas PTSP setiap hari Senin pagi; - Monitoring dan evaluasi oleh Hakim Tinggi Pengawas PTSP; dan - Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Survei IPAK dan IKM Pengadilan Tinggi Manado.	Tidak ada permasalahan	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95%	100%	105,26%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	<p>a. Melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; dan</p> <p>b. Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	<p>- Pada triwulan II pengiriman salinan putusan perkara ke Pengadilan Pengadilan Negeri Pengaju dilaksanakan secara tepat waktu; dan</p> <p>- Melaksanakan Keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p>	Tidak ada permasalahan	-

Manado, 10 Juli 2014

Ketua Pengadilan Tinggi Manado



Asli Ginting



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapangget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomarsi@gmail.com](mailto:ptmanadomarsi@gmail.com)

---

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2024**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259. [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

**PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan II		
				Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	38	38 100,00%	105,26
2.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	4	4 100,00%	105,26
3.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	41	41 100,00%	105,26
4.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90		94,9%	105,45
5.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35	171	50 29,24%	83,54
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95	4	4 100,00%	105,26
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95	41	41 100,00%	105,26
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	95	38	38 100,00%	105,26



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

**PENJELASAN**

**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Indikator : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur capaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	38	38 (100%)	105,26%

Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Khusus untuk perkara tipikor, penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain melaksanakan penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

Indikator : Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur capaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	4	4 (100%)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Khusus untuk perkara tipikor, penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmatja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

Indikator : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur capaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	41	41 (100 %)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Khusus untuk perkara tipikor, penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

Indikator : Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap layanan peradilan Pengadilan Tinggi Manado dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	94,9	94,9%	105,45%

Capaian kinerja berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I dan II di mana pada Triwulan I diperoleh nilai indeks sebesar 3,78/94,51% dan 3,83/95,76% dan Triwulan II 3,75/93,83% dan 3,82/95,53% . Nilai indeks tersebut telah menunjukkan bahwa pelayanan Pengadilan Tinggi Manado berada pada tingkat mutu pelayanan A (Sangat Baik) dan Bersih dari Korupsi.

Sumber daya yang digunakan yaitu sumber daya manusia khususnya petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang sangat penting karena perannya dalam menjamin pelayanan cepat, efisien dan berkualitas kepada masyarakat. Pengadilan Tinggi Manado melalui Penanggung Jawab PTSP selalu memberikan *briefing* kepada petugas PTSP setiap hari Senin pagi. Selain itu Pengadilan Tinggi Manado juga selalu menindaklanjuti tiga unsur terendah pada Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koroemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

Indikator : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini mengukur Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35	171	50 (29,24%)	83,54%

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian tersebut di atas yaitu

- Kepaniteraan Hukum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado.
- Rapat Teknis antara Pimpinan dengan Hakim Tinggi untuk membahas teknis penyelesaian perkara.
- Hakim Tinggi mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi melalui diklat, bimbingan teknis, sosialisasi dalam penanganan dan penyelesaian perkara.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator ini mengukur capaian salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95	4	4 (100%)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Indikator ini mengukur salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	95	38	38 (100 %)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.

---

## MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 TRIWULAN III PENGADILAN TINGGI MANADO



**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 TRIWULAN III  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105,26%

NO	INDIKATOR	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	a.Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan; dan b.Melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.	- Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan sedangkan rata – rata penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Manado 2 (dua) bulan; - Hakim Tinggi Pengawas Bidang melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara rutin pada subbag/unit yang diawasi; - Rapat Teknis antara Pimpinan dengan Hakim Tinggi untuk membahas teknis penyelesaian perkara; - Rapat Teknis antara Panitera Pengadilan Tinggi Manado dengan Panitera dan Panitera Muda pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado;	- Masih ada ketidakpatuhan dalam : input penetapan hari sidang (1 perkara); input pertimbangan hukum (1 perkara); waktu input putusan (3 perkara); dan verifikasi salinan putusan pada perkara banding elektronik (eCourt) 5 perkara. - Presentase dokumen elektronik yang diunggah ke SIPP Banding dengan yang masuk ke direktori putusan masih ada yang belum sesuai (4 perkara).	- Penginputan penetapan hari sidang, pertimbangan hukum, serta putusan melalui aplikasi SIPP tetap dilaksanakan meskipun sudah melewati jangka waktu yang sudah ditetapkan; termasuk melaksanakan verifikasi salinan putusan pada perkara banding elektronik (eCourt). - Pembinaan oleh Pimpinan saat rapat monitoring dan evaluasi bulanan; dan - Pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada unit terkait.

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Rapat Teknis Pimpinan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado dengan Hakim, Panitera dan Unit Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado;</li><li>- Melaksanakan monitoring dan evaluasi akurasi dan kualitas data SIPP Pengadilan Tinggi Manado; dan</li><li>- Pembinaan dan Pengawasan oleh Ketua/Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.</li></ul>		
--	--	--	---	--	--

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95%	100%	105,26%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	<p>a. Melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; dan</p> <p>b. Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	<p>- Pada triwulan III pengiriman salinan putusan perkara ke Pengadilan Pengadilan Negeri Pengaju dilaksanakan secara tepat waktu; dan</p> <p>- Melaksanakan Keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p>	Tidak ada permasalahan	-



Manado, 2 Oktober 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Asli Ginting



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapangget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

---

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2024**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

**PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan III		
				Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	58	58 100,00%	105,26
2.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	5	5 100,00%	105,26
3.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	43	43 100,00%	105,26
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95	5	5 100,00%	105,26
5.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95	43	43 100,00%	105,26
6.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	95	58	58 100,00%	105,26



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kimia Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

**PENJELASAN**

**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Indikator : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur capaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	58	58 (100%)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Khusus untuk perkara tipikor, penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain melaksanakan penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kina Atas, Kecamatan Mapangget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

Indikator : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur capaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	43	43 (100 %)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Khusus untuk perkara tipikor, penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kina Atas, Kecamatan Mapangget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanademnsri@gmail.com](mailto:ptmanademnsri@gmail.com)

**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator ini mengukur capaian salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95	5	5 (100%)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Keesoemah Atmajaja, Kimia Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator ini mengukur capaian salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95%	43	43 (100%)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

---

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Indikator ini mengukur salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	95	58	58 (100 %)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.

---

## MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 TRIWULAN IV PENGADILAN TINGGI MANADO



**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 TRIWULAN IV  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105,26%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi <sup>1</sup>	35%	46,84%	133,82%
		c. Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan <sup>2</sup>	90%	94,87%	105,41%

NO	INDIKATOR	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	a. Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan; dan b. Melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.	- Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan sedangkan rata-rata penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Manado 2 (dua) bulan; - Hakim Tinggi Pengawas Bidang melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara rutin pada subbag/unit yang diawasi; - Rapat Teknis antara Pimpinan dengan Hakim Tinggi untuk membahas teknis penyelesaian perkara; - Rapat Teknis antara Panitera Pengadilan Tinggi Manado dengan	Tidak ada permasalahan	-

<sup>1</sup> Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di atas merupakan realisasi dan capaian pada Periode Semester II Tahun 2024

<sup>2</sup> Indeks Persepsi *Stakeholder* yang Puas Terhadap Layanan Peradilan merupakan realisasi dan capaian pada Periode Triwulan III dan IV Tahun 2024

			<p>Panitera dan Panitera Muda pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Teknis Pimpinan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado dengan Hakim, Panitera dan Unit Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado;</li> <li>- Melaksanakan monitoring dan evaluasi akurasi dan kualitas data SIPP Pengadilan Tinggi Manado; dan</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan oleh Ketua/Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.</li> </ul>		
	<p>b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p>	<p>a. Melaksanakan pendataan perkara perdata, pidana dan pidana khusus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;</p> <p>b. Peningkatan kualitas putusan yang memberikan rasa keadilan/kepuasan pada masyarakat; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepaniteraan Hukum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado.</li> <li>- Rapat Teknis antara Pimpinan dengan Hakim Tinggi untuk membahas teknis penyelesaian perkara.</li> </ul>	Tidak ada permasalahan	-

		c. Pengembangan kompetensi Hakim melalui diklat, bimbingan teknis, sosialisasi dalam penanganan dan penyelesaian perkara.	- Hakim Tinggi mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi melalui diklat, bimbingan teknis, sosialisasi dalam penanganan dan penyelesaian perkara.		
a. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	<p>a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada Petugas PTSP;</p> <p>b. Menindaklanjuti tiga unsur terendah dalam Survey Kepuasan Masyarakat; dan</p> <p>c. Memberikan penghargaan/<i>reward</i> secara periodik kepada Petugas PTSP terbaik.</p>	<p>- Penanggung Jawab PTSP melaksanakan pembinaan kepada Petugas PTSP setiap hari Senin pagi;</p> <p>- Monitoring dan evaluasi oleh Hakim Tinggi Pengawas PTSP; dan</p> <p>- Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Survei IPAK dan IKM Pengadilan Tinggi Manado.</p>	Tidak ada permasalahan	-	

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95%	100%	105,26%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	<p>a. Melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; dan</p> <p>b. Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	<p>- Pada triwulan IV pengiriman salinan putusan perkara ke Pengadilan Pengadilan Negeri Pengaju dilaksanakan secara tepat waktu; dan</p> <p>- Melaksanakan Keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri</p>	Tidak ada permasalahan	-

Manado, 2 Januari 2025  
Ketua Pengadilan Tinggi Manado



Asli Ginting



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

---

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2024**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
-Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259. [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

**PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	62	62 100,00%	105,26
2.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	5	5 100,00%	105,26
3.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	49	49 100,00%	105,26
4.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90		94,87%	105,41
5.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35	222	104 46,84%	133,82
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95	5	4 100,00%	105,26
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95	49	41 100,00%	105,26
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	95	62	38 100,00%	105,26



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259. [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

**PENJELASAN**

**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Indikator : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur capaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	62	62 (100%)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Khusus untuk perkara tipikor, penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Selain melaksanakan penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

Indikator : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur capaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95	49	49 (100 %)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Khusus untuk perkara tipikor, penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

Indikator : Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap layanan peradilan Pengadilan Tinggi Manado dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	94,87	94,87%	105,41%

Capaian kinerja berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III dan IV di mana pada Triwulan III diperoleh nilai indeks sebesar 3,89/97,22% dan 3,79/94,79% dan Triwulan IV 3,81/95,28% dan 3,69/92,21%. Nilai indeks tersebut telah menunjukkan bahwa pelayanan Pengadilan Tinggi Manado berada pada tingkat mutu pelayanan A (Sangat Baik) dan Bersih dari Korupsi.

Sumber daya yang digunakan yaitu sumber daya manusia khususnya petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang sangat penting karena perannya dalam menjamin pelayanan cepat, efisien dan berkualitas kepada masyarakat. Pengadilan Tinggi Manado melalui Penanggung Jawab PTSP selalu memberikan *briefing* kepada petugas PTSP setiap hari Senin pagi. Selain itu Pengadilan Tinggi Manado juga selalu menindaklanjuti tiga unsur terendah pada Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

Indikator : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini mengukur Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	35	222	104 (46,84%)	133,82%

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian tersebut di atas yaitu

- Kepaniteraan Hukum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado.
- Rapat Teknis antara Pimpinan dengan Hakim Tinggi untuk membahas teknis penyelesaian perkara.
- Hakim Tinggi mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi melalui diklat, bimbingan teknis, sosialisasi dalam penanganan dan penyelesaian perkara.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator ini mengukur capaian salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95	5	5 (100%)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Indikator ini mengukur salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	95	62	62 (100 %)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Kompleks Pengadilan Terpadu  
Jl. Prof.Dr.Mr.Raden S.E. Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget  
Kota Manado, Sulawesi Utara, 95259, [www.pt-manado.go.id](http://www.pt-manado.go.id), [ptmanadomari@gmail.com](mailto:ptmanadomari@gmail.com)

Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator ini mengukur capaian salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95%	49	49 (100%)	105,26%

*Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Selain melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan SOP Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum menunjang keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya anggaran yang mendukung capaian tersebut di atas.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN TINGGI MANADO

Jl. Pahl. Dr. M. Hoesni Salehno, E-trek Komplek Alhuda, Kota Atas, W. Manado  
Sulawesi Utara

<https://www.pt-manado.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

3,78 / 94,51%

Jumlah	40 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LANI-LAKI : 30 PEREMPUAN : 10
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 2 SNP : 0 S1 : 21 SMU : 13 S2 : 4 Diploma 1 : 0 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 13 TNI : 0 POLRI : 0 LAINNYA : 9 SWASTA : 8 WIRAUSAHA : 0 TENAGA KONTRAK : 10

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dan pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?           | 3,700 |
| 2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?  | 3,725 |
| 3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ? | 3,750 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah

Ringkasan Tindak Lanjut terhadap 3 unsur terendah: Perilaku pelaksana, Kompetensi pelaksana, dan produk spesifikasi jenis pelayanan

- Untuk membentuk perilaku pelaksana dan meningkatkan kompetensinya maka dilakukan pembekalan kepada para Petugas PTSP dalam bentuk Bimbingan Teknis. Kepada para Petugas PTSP dijelaskan tentang layanan yang tersedia serta standar layanannya. Diupayakan pula teknik - teknik Customer Service yang berorientasi pelayanan prima dan mengutamakan integritas.
- Dilaksanakan pula mentoring dari para Penanggung Jawab dan Pengawas terkait cara - cara melayani pengguna layanan dan prosedur yang ada di Pengadilan Tinggi Manado. Kepada para Petugas PTSP diberikan pula pengarahan terkait teknis dan administrasi pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam SOP penanganan perkara.
- Untuk memantapkan pemahaman petugas PTSP terkait produk spesifikasi layanan yang tersedia di PT Manado, seluruh layanan disampaikan dan dijelaskan dalam apel bersama antara Pengawas, Penanggung Jawab dan Petugas PTSP dalam program Baku Beking Pande. Setiap pertanyaan diajukan langsung dari Petugas PTSP terkait produk layanan dicatat dalam Grahik Baku untuk kemudian dibahas bersama dalam apel sehingga pertemuan berjalan dua arah.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

22 April 2024



Pin Ketua Pengadilan Tinggi Manado

IVONNE W. K. MARAMIS, SH., MH

	<b>MAHKAMAH AGUNG RI</b> <b>DIREKTUR JENDERAL BADAN</b> <b>PERADILAN UMUM</b> <b>PENGADILAN TINGGI MANADO</b> Jl. Prof.Dr.Mr.S.E Koesoemah Atmadja Kima Atas Kecamatan Mapanget Kota Manado Telp : 0431- 848760 E-mail: <a href="mailto:ptmanadomari@gmail.com">ptmanadomari@gmail.com</a> Website: <a href="http://www.pt-manado.go.id">www.pt-manado.go.id</a>	Nomor Dokumen		
		Tanggal Pembuatan		
		Tanggal Revisi		
		Revisi Ke		
		Disahkan Tanggal		
		Disahkan Oleh		

**LAPORAN TINDAK LANJUT**  
**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**  
**TRIWULAN I 2024**

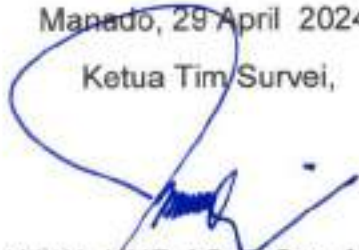
NO.	PERIODE	EVALUASI 3 UNSUR TERENDAH SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Periode I 1 Januari 2024 Sampai 31 Maret 2024	1. Tentang Perilaku Pelaksana. 2. Tentang Kompetensi Pelaksana. 3. Tentang Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.	1. Di lakukan briefing / sosialisasi oleh penanggung jawab PTSP dengan disaksikan Pembina PTSP yang pelaksanaannya satu kali dalam seminggu pada setiap hari Senin setelah pelaksanaan apel pagi. 2. Dilakukan pembekalan informasi layanan melalui Bimtek Pelayanan Petugas PTSP guna peningkatan kompetensi pelaksana layanan PTSP. 3. Memaksimalkan publikasi melalui webside PT Manado, monitor pelayanan & penyampaian langsung oleh petugas layanan.	Telah ditindaklanjuti Eviden : Dokumen foto - Kegiatan briefing / Bimtek; - Media Publikasi;

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Tinggi Manado

  
 ASLI GINTING, S.H.,M.H

Manado, 29 April 2024

Ketua Tim Survei,

  
 JABAL NUR AS, S.Sos.,M.H.

Lampiran : Laporan Tindak Lanjut Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I Tahun 2024





PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS  
**3,83 / 95,76%**

Jumlah	43 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 31	
	PEREMPUAN : 12	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 0	Diploma 2 : 0
	SMP : 1	Diploma 3 : 2
	SMU : 15	S1 : 23
	Diploma 1 : 0	S2 : 2
		S3 : 0
	Pekerjaan	PNS : 14
TNI : 0		WIRAUSAHA : 0
POLRI : 0		TENAGA KONTRAK : 9
LAINNYA : 10		

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ?	3,070
2. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP )	3,767
3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3,860

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Ringkasan Tindak Lanjut terhadap 3 Unsur terendah: Hadiah, Transparansi Biaya, Biaya Tambahan

- menampilkan informasi Standar Layanan, biaya perkara dan menampilkan anti gratifikasi melalui media - media yang tersedia (Layar Monitor ruangan PTSP, banner Standar Layanan di area PTSP, stiker anti gratifikasi di meja PTSP, website dan media sosial)
- Secara rutin Pengawas PTSP memberikan pembinaan dan pengarahan kepada petugas PTSP dalam apel bersama terutama terkait pemberian hadiah dan gratifikasi.
- Memberikan sosialisasi dan informasi kepada pengguna layanan bahwa biaya tambahan yang terdapat dalam Layanan Penyempahan Advokat adalah untuk Salinan Berita Acara Sumpah yaitu PNBP Rp 10.000,- . dan Untuk Advokat yang disumpah sejak periode 2022 telah menggunakan Berita Acara Sumpah Digital dengan menggunakan aplikasi AVATAR

2. Ringkasan Tindak Lanjut terhadap 3 Unsur terendah: Hadiah, Transparansi Biaya, Biaya Tambahan

- menampilkan informasi Standar Layanan, biaya perkara dan menampilkan anti gratifikasi melalui media - media yang tersedia (Layar Monitor ruangan PTSP, banner Standar Layanan di area PTSP, stiker anti gratifikasi di meja PTSP, website dan media sosial)
- Secara rutin Pengawas PTSP memberikan pembinaan dan pengarahan kepada petugas PTSP dalam apel bersama terutama terkait pemberian hadiah dan gratifikasi.
- Memberikan sosialisasi dan informasi kepada pengguna layanan bahwa biaya tambahan yang terdapat dalam Layanan Penyempahan Advokat adalah untuk Salinan Berita Acara Sumpah yaitu PNBP Rp 10.000,- . dan Untuk Advokat yang disumpah sejak periode 2022 telah menggunakan Berita Acara Sumpah Digital dengan menggunakan aplikasi AVATAR

3. Ringkasan Tindak Lanjut terhadap 3 Unsur terendah: Hadiah, Transparansi Biaya, Biaya Tambahan

- menampilkan informasi Standar Layanan, biaya perkara dan menampilkan anti gratifikasi melalui media - media yang tersedia (Layar Monitor ruangan PTSP, banner Standar Layanan di area PTSP, stiker anti gratifikasi di meja PTSP, website dan media sosial)
- Secara rutin Pengawas PTSP memberikan pembinaan dan pengarahan kepada petugas PTSP dalam apel bersama terutama terkait pemberian hadiah dan gratifikasi.
- Memberikan sosialisasi dan informasi kepada pengguna layanan bahwa biaya tambahan yang terdapat dalam Layanan Penyempahan Advokat adalah untuk Salinan Berita Acara Sumpah yaitu PNBP Rp 10.000,- . dan Untuk Advokat yang disumpah sejak periode 2022 telah menggunakan Berita Acara Sumpah Digital dengan menggunakan aplikasi AVATAR

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

4 Juni 2024  
Ketua Pengadilan Tinggi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Elendj Kosoemah Almadja, Kima Atas, Kec. Mampang  
 Sulawesi Utara

<https://www.pt-manado.go.id/>



**PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT**

**NILAI INDEKS**

**3,75 / 93,83%**

Jumlah	81 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 54	PEREMPUAN : 27
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0	
	SD : 0	Diploma 3 : 1
	SMP : 0	S1 : 70
	SMU : 4	S2 : 6
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 16	SWASTA : 19
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 2
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 1
	LAINNYA : 43	

**Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :**

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?                             | 3,667 |
| 2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?                                     | 3,716 |
| 3. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ? | 3,716 |

**Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :**

**Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah:**

- Unsur U6 - Kompetensi Pelaksana . Tindak Lanjut yang telah dilakukan berupa pembinaan/pengarahan kepada seluruh petugas layanan oleh Penanggung Jawab/Pembina PTSP sebagai pembekalan informasi layanan guna peningkatan kompetensi juga mutu pelayanan yang diberikan melalui PTSP
- Unsur U2 - Prosedur. Tindak Lanjut yang telah dilakukan berupa memaksimalkan publikasi melalui website PT Manado, monitor pelayanan dan banner tentang daftar, prosedur standar pelayanan, juga informasi langsung yang disampaikan oleh petugas layanan
- Unsur U4 - Biaya/Tarif. Tindak Lanjut yang telah dilakukan adalah dengan memberikan informasi melalui media monitor pada ruang PTSP, banner dan penyampaian oleh petugas PTSP tentang perlu adanya bukti transaksi pada kegiatan yang dilakukan di Pengadilan (yang dipungut biaya PNBP)

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**



	<b>MAHKAMAH AGUNG RI</b> <b>DIREKTUR JENDERAL BADAN</b> <b>PERADILAN UMUM</b> <b>PENGADILAN TINGGI MANADO</b> Jl. Prof.Dr.Mr.S.E Koesoemah Atmadja Kima Atas Kecamatan Mapanget Kota Manado Telp : 0431- 848760 E-mail: <a href="mailto:ptmanadomari@gmail.com">ptmanadomari@gmail.com</a> Website: <a href="http://www.pt-manado.go.id">www.pt-manado.go.id</a>	Nomor Dokumen		
		Tanggal Pembuatan	12 Juli 2024	
		Tanggal Revisi		
		Revisi Ke		
		Disahkan Tanggal	12 Juli 2024	
		Disahkan Oleh	KPT	
<b>LAPORAN TINDAK LANJUT</b> <b>SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)</b> <b>TRIWULAN II 2024</b>				

NO.	PERIODE Ke II	EVALUASI 3 UNSUR TERENDAH SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	1 April 2024 Sampai 30 Juni 2024	1. Pendapat tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan. 2. Pemahaman tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan. 3. Pendapat tentang biaya tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan (Sesuai dengan tarif resmi)	1. Secara rutin dilakukan pembinaan / pengarahannya kepada seluruh petugas layanan oleh Penanggung jawab / Pembina PTSP sebagai pembekalan informasi layanan guna peningkatan kompetensi jucu mutu pelayanan yang diberikan melalui PTSP; 2. Memaksimalkan publikasi melalui webside PT Manado, monitor pelayanan & bunner tentang daftar, prosedur standar pelayanan, juga informasi langsung yang disampaikan oleh petugas layanan. 3. Memberikan informasi melalui media monitor pada ruang PTSP, banner dan penyampaian oleh petugas PTSP tentang perlu adanya bukti transaksi pada kegiatan yang dilakukan di Pengadilan (yang dipungut biaya PNBP).	Telah ditindaklanjuti Eviden : Dokumen foto - Kegiatan Pembinaan/ pengarahannya; - Sarana Publikasi, berupa layer monitor, banner, juga kegiatan pelayanan petugas PTSP;

**Rekomendasi (SKM);**

Sebagai tindak lanjut kategori 3 (tiga) terendah yaitu: **Perilaku pelaksana, Kompetensi pelaksana, dan produk spesifikasi jenis layanan.** maka perlu mentoring dan pembekalan kepada seluruh petugas PTSP Pengadilan Tinggi Manado, juga pemeliharaan media informasi.

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Tinggi Manado

  
 ASLI GINTING, S.H.,M.H.

Manado, 12 Juli 2024

Ketua Tim Survei,

  
 JABAL NUR AS, S.Sos.,M.H.

Pembinaan Petugas Layanan PTSP & Layanan Kepada Penggunaan Layanan Pada Ruang PTSP



Pelayanan Informasi







**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

Jl. Prof. Dr. M. Rades Soelaman Effendi Koesoeman Amadjo, Kota Asas, Kec. Mepangri

Sulawesi Utara

<https://www.pt-manado.go.id/>



**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**

Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024

**SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**NILAI INDEKS**

**3,82 / 95,53%**

Jumlah	90 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 66	
	PEREMPUAN : 24	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 0	Diploma 2 : 1
	SMP : 0	Diploma 3 : 2
	SMU : 4	S1 : 72
	Diploma 1 : 0	S2 : 11
Pekerjaan	PNS : 18	
	TNI : 0	SWASTA : 22
	POLRI : 0	WIRUSAHA : 3
	LAINYA : 46	TENAGA KONTRAK : 1

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ?   | 3,500 |
| 2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?                                   | 3,878 |
| 3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBSP ) | 3,711 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah:

- Unsur U6 - Kompetensi Pelaksana . Tindak Lanjut yang telah dilakukan berupa pembinaan/pengarahan kepada seluruh petugas layanan oleh Penanggung Jawab/Pembina PTSP sebagai pembekalan informasi layanan guna peningkatan kompetensi juga mutu pelayanan yang diberikan melalui PTSP.
- Unsur U2 - Prosedur. Tindak Lanjut yang telah dilakukan berupa memaksimalkan publikasi melalui website PT Manado, monitor pelayanan dan banner tentang daftar, prosedur standar pelayanan, juga informasi langsung yang disampaikan oleh petugas layanan.
- Unsur U4 - Biaya/Tarif. Tindak Lanjut yang telah dilakukan adalah dengan memberikan informasi melalui media monitor pada ruang PTSP, banner dan penyampaian oleh petugas PTSP tentang perlu adanya bukti transaksi pada kegiatan yang dilakukan di Pengadilan (yang dipungut biaya PNBSP)

2. Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah:

- Unsur U6 - Hadiah . Tindak Lanjut yang telah dilakukan berupa pembinaan/pengarahan kepada seluruh petugas layanan oleh Penanggung Jawab/Pembina PTSP sebagai pembekalan informasi layanan guna peningkatan kompetensi juga mutu pelayanan yang diberikan melalui PTSP.
- Unsur U4 - Transparansi Biaya. Tindak Lanjut yang telah dilakukan berupa memaksimalkan publikasi melalui website PT Manado, monitor pelayanan dan banner tentang daftar, prosedur standar pelayanan, juga informasi langsung yang disampaikan oleh petugas layanan.
- Unsur U7 - Transparansi Pembayaran. Tindak Lanjut yang telah dilakukan adalah dengan memberikan informasi melalui media monitor pada ruang PTSP, banner dan penyampaian oleh petugas PTSP tentang perlu adanya bukti transaksi pada kegiatan yang dilakukan di Pengadilan (yang dipungut biaya PNBSP)

3. Tindak Lanjut 3 Unsur Terendah:

- Unsur U6 - Kompetensi Pelaksana . Tindak Lanjut yang telah dilakukan berupa pembinaan/pengarahan secara rutin kepada semua petugas PTSP pada setiap hari senin pagi oleh Penanggung Jawab/Pembina PTSP tentang larangan menerima hadiah atas setiap pelayanan yang diberikan sebagai tanda terima kasih dalam bentuk apapun.
- Unsur U4 - Transparansi Biaya. Tindak Lanjut yang telah dilakukan berupa memaksimalkan ketersediaan media informasi bagi pengguna layanan yang mudah dilihat terkait informasi tentang tarif/biaya yakni pada layar monitor, banner - banner juga penyampaian secara langsung oleh petugas PTSP pada penerima layanan.
- Unsur U7 - Transparansi Pembayaran. Tindak Lanjut yang telah dilakukan adalah dengan memberikan informasi melalui media monitor pada ruang PTSP, banner dan penyampaian oleh petugas PTSP tentang perlu adanya bukti transaksi pada kegiatan yang dilakukan di Pengadilan (yang dipungut biaya PNBSP)

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

12 Juli 2024  
 Ketua Pengadilan Tinggi  
  
 KURTUNING S.H., M.B.

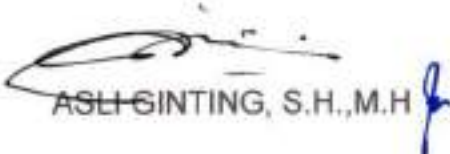
	<b>MAHKAMAH AGUNG RI</b> <b>DIREKTUR JENDERAL BADAN</b> <b>PERADILAN UMUM</b> <b>PENGADILAN TINGGI MANADO</b> Jl. Prof.Dr.Mr.S.E Koesoemah Atmadja Kima Atas Kecamatan Mapanget Kota Manado Telp : 0431- 848760 E-mail: <a href="mailto:ptmanadomari@gmail.com">ptmanadomari@gmail.com</a> Website: <a href="http://www.pt-manado.go.id">www.pt-manado.go.id</a>	Nomor Dokumen		
		Tanggal Pembuatan	12 Juli 2024	
		Tanggal Revisi		
		Revisi Ke		
		Disahkan Tanggal	12 Juli 2024	
		Disahkan Oleh	KPT	
<b>LAPORAN TINDAK LANJUT</b> <b>SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)</b> <b>TRIWULAN II 2024</b>				

NO.	PERIODE II	EVALUASI 3 UNSUR TERENDAH SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	1 April 2024 Sampai 30 Juni 2024	1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan. 2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan Pengadilan. 3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan/ pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan (untuk pelayanan yang dipungut biaya/PNBP).	1. Dilakukan pembinaan / pengarahannya secara rutin kepada semua petugas PTSP pada setiap hari senin pagi oleh penanggung jawab / Pembina PTSP tentang larangan menerima hadiah atas setiap pelayanan yang diberikan sebagai tanda terima kasih dalam bentuk apapun. 2. Memaksimalkan ketersediaan media informasi bagi pengguna layanan yang mudah dilihat terkait informasi tentang tarif/biaya yakni pada layar monitor, banner juga seruan/penyampaian oleh petugas PTSP; 3. Memberikan informasi melalui media monitor pada ruang PTSP, banner dan penyampaian oleh petugas PTSP tentang perlu adanya bukti transaksi pada kegiatan yang dilakukan di Pengadilan (yang dipungut biaya PNBP).	Telah ditindaklanjuti Eviden : Dokumen foto - Kegiatan Pembinaan/ pengarahannya; - Sarana Publikasi, berupa layar monitor, banner - Kegiatan / Pelaksanaan layanan pada area layanan PTSP.

**Rekomendasi (SPAK) :**

Sebagai tindak lanjut untuk memperbaiki indikator **Hadiah, Transparansi Biaya dan Biaya Tambahan** yaitu menampilkan informasi Standar Layanan, biaya perkara dan tampilan anti gratifikasi pada Layar Monitor ruangan PTSP serta Pengawas PTSP memberikan pembinaan kepada petugas PTSP.

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Tinggi Manado

  
 ASLI GINTING, S.H.,M.H.

Manado, 12 Juli 2024

Ketua Tim Survei,

  
 JABAL NUR AS, S.Sos.,M.H.

Pemberitahuan Tolak Gratifikasi Yang Tersedia Di Ruang PTSP



Pengarahan Petugas Layanan PTSP



## Biaya Layanan Yang Tersedia Di Ruang PTSP






**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

 Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kec. Mapanget  
 Sulawesi Utara

<https://www.pt-manado.go.id/>

**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**

Periode 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024

**SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**
**NILAI INDEKS**
**3,79 / 94,79%**

Jumlah	48 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 32	
	PEREMPUAN : 16	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 0	Diploma 2 : 0
	SMP : 0	Diploma 3 : 0
	SMU : 8	S1 : 29
	Diploma 1 : 1	S2 : 8
		S3 : 2
Pekerjaan	PNS : 1	SWASTA : 10
	TNI : 0	WIRUSAHA : 0
	POLRI : 2	TENAGA KONTRAK : 3
	LAINNYA : 32	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ?	2,917
2. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3,708
3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBPN )	3,792

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

**DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI**

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

1 Oktober 2024  
 Ketua Pengadilan Tinggi


**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**PENGADILAN TINGGI MANADO**

 Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kec. Mapanget  
 Sulawesi Utara

<https://www.pt-manado.go.id/>

**PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

Periode 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT**
**NILAI INDEKS**
**3,89 / 97,22%**

Jumlah	41 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 30	
	PEREMPUAN : 11	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 0	Diploma 2 : 0
	SMP : 0	Diploma 3 : 0
	SMU : 9	S1 : 20
	Diploma 1 : 2	S2 : 7
		S3 : 3
Pekerjaan	PNS : 3	SWASTA : 8
	TNI : 0	WIRUSAHA : 0
	POLRI : 1	TENAGA KONTRAK : 3
	LAINNYA : 26	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?	3,756
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	3,829
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?	3,878

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

**DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI**

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

1 Oktober 2024  
 Ketua Pengadilan Tinggi



**PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**  
Periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT**

**NILAI INDEKS**

**3,81/ 95,28%**

Jumlah	30 RESPONDEN
Jenis	LAKI – LAKI : 23
Kelamin	PEREMPUAN : 7
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 SD : 0 SMP : 0 SMU : 5 Diploma 1 : 0
Pekerjaan	PNS : 5 TNI : 0 POLRI : 0 LAINNYA : 14 Diploma 2 : 0 Diploma 3 : 1 S1 : 22 S2 : 2 S3 : 0 SWASTA : 7 WIRUSAHA : 1 TENAGA KONTRAK : 3

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tariff yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI? | 3,733 |
| 2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan?                                      | 3,767 |
| 3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan?                              | 3,767 |

Tindak Lanjut dari 3 Unsur terendah:

1. Memperbarui informasi tarif layanan pada media social, monitor informasi PTSP dan brosur layanan dengan tampilan yang lebih informatif
2. Memberikan pelatihan kepada Petugas PTSP terkait tatacara pemberian layanan yang disesuaikan dengan SOP yang berlaku terkait waktu layanan
3. Melakukan evaluasi layanan dan memberikan pengarahan terkait SOP layanan secara berkala dalam apel rutin Petugas PTSP

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

20 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,

  
AMIN SUTIKNO, S.H., M.H. f





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN TINGGI MANADO

Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kec. Mapanggei  
Sulawesi Utara

<https://www.pt-manado.go.id/>



**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
Periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

**SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**NILAI INDEKS**

**3,69/ 92,21%**

Jumlah	35 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI – LAKI : 25 PEREMPUAN : 10	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah Diploma 2 : 0 SD : 0 SMP : 0 SMU : 8 Diploma 1 : 0	Diploma 3 : 0 S1 : 24 S2 : 3 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 5 TNI : 0 POLRI : 0 LAINNYA : 14	SWASTA : 7 WIRAUUSAHA : 2 TENAGA KONTRAK : 3

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?                          | 3,200 |
| 2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tariff/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan? | 3,286 |
| 3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?  | 3,486 |

Tindak Lanjut dari 3 Unsur terendah:

1. Memperbarui informasi tariff/biaya layanan pada platform media sosial, monitor informasi dan brosur layanan di area PTSP
2. Melakukan Sosialisasi SOP dan Informasi Layanan Penyempahan Advokat kepada Calon Advokat sebelum kegiatan Penyempahan Advokat

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

20 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,

  
AMIN SUTIKNO, S.H., M.H. †



## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 1 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>17,597,069,000</b>	<b>0</b>	<b>15,880,086,471</b>	<b>1,481,746,692</b>	<b>17,361,833,163</b>	<b>98.66 %</b>	<b>235,235,837</b>
WA Program Dukungan Manajemen	17,597,069,000	0	15,880,086,471	1,481,746,692	17,361,833,163	98.66 %	235,235,837
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	17,597,069,000	0	15,880,086,471	1,481,746,692	17,361,833,163	98.66 %	235,235,837
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>17,597,069,000</b>	<b>0</b>	<b>15,880,086,471</b>	<b>1,481,746,692</b>	<b>17,361,833,163</b>	<b>98.66 %</b>	<b>235,235,837</b>
<b>EBA.956 Layanan BMN</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>	<b>8,520,000</b>	<b>0</b>	<b>8,520,000</b>	<b>94.67 %</b>	<b>480,000</b>
<b>051 Bimbingan Teknis Layanan BMN</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>	<b>8,520,000</b>	<b>0</b>	<b>8,520,000</b>	<b>94.67 %</b>	<b>480,000</b>
051.0A Bimbingan Teknis Layanan BMN	9,000,000	0	8,520,000	0	8,520,000	94.67 %	480,000
521211 Belanja Bahan	3,600,000	0	3,120,000	0	3,120,000	86.67 %	480,000
000161. Bahan	3,600,000	0	3,120,000	0	3,120,000	86.67 %	480,000
522151 Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
000162. Honorarium Narasumber	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
<b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>	<b>17,588,069,000</b>	<b>0</b>	<b>15,871,566,471</b>	<b>1,481,746,692</b>	<b>17,353,313,163</b>	<b>98.67 %</b>	<b>234,755,837</b>
<b>001 Gaji dan Tunjangan</b>	<b>14,146,677,000</b>	<b>0</b>	<b>12,836,798,316</b>	<b>1,146,279,694</b>	<b>13,983,078,010</b>	<b>98.84 %</b>	<b>163,598,990</b>
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	14,146,677,000	0	12,836,798,316	1,146,279,694	13,983,078,010	98.84 %	163,598,990
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	3,577,856,000	0	3,334,264,060	236,760,860	3,571,024,920	99.81 %	6,831,080
000001. Tambahan Kenaikan Gaji	243,583,000	0	0	236,760,860	236,760,860	97.20 %	6,822,140
000002. Belanja Gaji Pokok PNS	2,812,620,000	0	2,812,611,860	0	2,812,611,860	100.00	8,140
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	258,334,000	0	258,333,900	0	258,333,900	100.00	100
000004. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	263,319,000	0	263,318,300	0	263,318,300	100.00	700
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	45,000	0	40,174	2,748	42,922	95.38 %	2,078
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS	37,000	0	33,544	2,748	36,292	98.09 %	708
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	4,000	0	3,206	0	3,206	80.15 %	794
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	4,000	0	3,424	0	3,424	85.60 %	576
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	266,308,000	0	248,159,540	17,250,730	265,410,270	99.66 %	897,730
000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	227,000,000	0	208,853,600	17,250,730	226,104,330	99.61 %	895,670

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 2 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	19,398,000	0	19,397,380	0	19,397,380	100.00	620
000010. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	19,910,000	0	19,908,560	0	19,908,560	99.99 %	1,440
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	46,123,000	0	42,515,132	3,324,044	45,839,176	99.38 %	283,824
000011. Belanja Tunj. Anak PNS	39,700,000	0	36,092,622	3,324,044	39,416,666	99.29 %	283,334
000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	3,163,000	0	3,162,834	0	3,162,834	99.99 %	166
000013. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	3,260,000	0	3,259,676	0	3,259,676	99.99 %	324
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	91,410,000	0	85,005,000	6,165,000	91,170,000	99.74 %	240,000
000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS	78,000,000	0	71,595,000	6,165,000	77,760,000	99.69 %	240,000
000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	6,705,000	0	6,705,000	0	6,705,000	100.00	0
000016. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	6,705,000	0	6,705,000	0	6,705,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	6,920,510,000	0	6,220,210,000	658,710,000	6,878,920,000	99.40 %	41,590,000
000017. Belanja Tunj. Fungsional PNS	6,017,230,000	0	5,316,930,000	658,710,000	5,975,640,000	99.31 %	41,590,000
000018. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	452,510,000	0	452,510,000	0	452,510,000	100.00	0
000019. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	450,770,000	0	450,770,000	0	450,770,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	1,549,415,000	0	1,396,946,110	60,198,176	1,457,144,286	94.04 %	92,270,714
000020. Belanja Tunjangan PPh PNS	1,193,000,000	0	1,040,531,879	60,198,176	1,100,730,055	92.27 %	92,269,945
000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	178,259,000	0	178,258,659	0	178,258,659	100.00	341
000022. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	178,156,000	0	178,155,572	0	178,155,572	100.00	428
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	133,000,000	0	122,172,540	8,835,240	131,007,780	98.50 %	1,992,220
000023. Belanja Tunj Beras PNS	133,000,000	0	122,172,540	8,835,240	131,007,780	98.50 %	1,992,220
511129 Belanja Uang Makan PNS	455,000,000	0	367,643,000	72,828,000	440,471,000	96.81 %	14,529,000
000024. Belanja Uang Makan PNS	455,000,000	0	367,643,000	72,828,000	440,471,000	96.81 %	14,529,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	39,140,000	0	34,580,000	2,585,000	37,165,000	94.95 %	1,975,000
000025. Belanja Tunjangan Umum PNS	34,000,000	0	29,440,000	2,585,000	32,025,000	94.19 %	1,975,000
000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	2,570,000	0	2,570,000	0	2,570,000	100.00	0
000027. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	2,570,000	0	2,570,000	0	2,570,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 3 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	225,450,000	0	205,200,000	18,900,000	224,100,000	99.40 %	1,350,000
000028. Tunjangan Kemahalan Hakim	225,450,000	0	205,200,000	18,900,000	224,100,000	99.40 %	1,350,000
511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	709,500,000	0	659,500,000	50,000,000	709,500,000	100.00	0
000029. Uang Kehormatan Hakim Ad Hoc Tipikor	600,000,000	0	550,000,000	50,000,000	600,000,000	100.00	0
000030. Uang Kehormatan Hakim Ad Hoc ( THR dan gaji ke-13)	109,500,000	0	109,500,000	0	109,500,000	100.00	0
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	90,316,000	0	83,293,600	6,407,200	89,700,800	99.32 %	615,200
000140. Belanja Gaji Pokok PPPK	77,500,000	0	70,479,200	6,407,200	76,886,400	99.21 %	613,600
000141. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	6,408,000	0	6,407,200	0	6,407,200	99.99 %	800
000142. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	6,408,000	0	6,407,200	0	6,407,200	99.99 %	800
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	28,000	0	1,308	92	1,400	5.00 %	26,600
000143. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1,000	0	96	0	96	9.60 %	904
000144. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1,000	0	96	0	96	9.60 %	904
000145. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	26,000	0	1,116	92	1,208	4.65 %	24,792
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,542,000	0	4,164,680	320,360	4,485,040	98.75 %	56,960
000146. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	321,000	0	320,360	0	320,360	99.80 %	640
000147. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 13)	321,000	0	320,360	0	320,360	99.80 %	640
000148. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	3,900,000	0	3,523,960	320,360	3,844,320	98.57 %	55,680
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,858,000	0	1,665,872	128,144	1,794,016	96.56 %	63,984
000149. Belanja Tunj. Anak PPPK (gaji ke 14)	129,000	0	128,144	0	128,144	99.34 %	856
000150. Belanja Tunj. Anak PPPK (gaji ke 13)	129,000	0	128,144	0	128,144	99.34 %	856
000151. Belanja Tunj. Anak PPPK	1,600,000	0	1,409,584	128,144	1,537,728	96.11 %	62,272
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14,920,000	0	13,780,000	1,060,000	14,840,000	99.46 %	80,000
000152. Belanja Tunj. Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	100.00	0
000153. Belanja Tunj. Fungsional PPPK (gaji ke 13)	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	100.00	0
000154. Belanja Tunj. Fungsional PPPK	12,800,000	0	11,660,000	1,060,000	12,720,000	99.38 %	80,000
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,256,000	0	4,707,300	362,100	5,069,400	96.45 %	186,600

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 4 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000155. Belanja Tunj. Beras PPPK	5,256,000	0	4,707,300	362,100	5,069,400	96.45 %	186,600
511628 Belanja Uang Makan PPPK	16,000,000	0	12,950,000	2,442,000	15,392,000	96.20 %	608,000
000156. Belanja Uang Makan PPPK	16,000,000	0	12,950,000	2,442,000	15,392,000	96.20 %	608,000
<b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>3,441,392,000</b>	<b>0</b>	<b>3,034,768,155</b>	<b>335,466,998</b>	<b>3,370,235,153</b>	<b>97.93 %</b>	<b>71,156,847</b>
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	1,103,023,000	0	938,122,901	163,370,487	1,101,493,388	99.86 %	1,529,612
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,007,823,000	0	845,508,751	160,805,237	1,006,313,988	99.85 %	1,509,012
000031. Keperluan Rumah Tangga Kantor	65,101,000	0	56,434,755	8,665,830	65,100,585	100.00	415
000032. Jasa Outsourcing Kebersihan Kawasan Pengadilan Terpadu Manado	388,752,000	0	323,149,370	64,642,084	387,791,454	99.75 %	960,546
000033. Jamuan Tamu	49,718,000	0	39,647,326	9,973,923	49,621,249	99.81 %	96,751
000034. Satpam	96,144,000	0	80,120,000	16,024,000	96,144,000	100.00	0
000035. THR Satpam	8,012,000	0	8,012,000	0	8,012,000	100.00	0
000036. Pengemudi	192,288,000	0	160,240,000	32,048,000	192,288,000	100.00	0
000037. THR Pengemudi	16,024,000	0	16,024,000	0	16,024,000	100.00	0
000038. Pramubhakti	174,816,000	0	145,680,000	29,136,000	174,816,000	100.00	0
000039. THR Pramubhakti	14,568,000	0	14,568,000	0	14,568,000	100.00	0
000040. Air Minum Galon Untuk Ruang Tamu Terbuka /PTSP/Pimpinan	2,400,000	0	1,633,300	315,400	1,948,700	81.20 %	451,300
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	95,200,000	0	92,614,150	2,565,250	95,179,400	99.98 %	20,600
000041. Keperluan Sehari-hari Kantor	95,200,000	0	92,614,150	2,565,250	95,179,400	99.98 %	20,600
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA	826,440,000	0	789,999,879	16,849,265	806,849,144	97.63 %	19,590,856
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	135,000,000	0	112,892,500	9,990,000	122,882,500	91.02 %	12,117,500
000042. Langganan Internet	132,000,000	0	109,892,500	9,990,000	119,882,500	90.82 %	12,117,500
000043. Lisensi Video Conference	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	28,500,000	0	20,691,050	6,859,265	27,550,315	96.67 %	949,685
000044. Biaya Pengiriman Surat	28,500,000	0	20,691,050	6,859,265	27,550,315	96.67 %	949,685
522112 Belanja Langganan Telepon	1,200,000	0	227,900	0	227,900	18.99 %	972,100

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 5 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000045. Langganan Telepon	1,200,000	0	227,900	0	227,900	18.99 %	972,100
522141 Belanja Sewa	661,740,000	0	656,188,429	0	656,188,429	99.16 %	5,551,571
000046. Sewa Mesin Fotocopy	658,140,000	0	652,588,429	0	652,588,429	99.16 %	5,551,571
000047. Sewa Web Hosting	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
002.0C PEMELIHARAAN KANTOR	917,577,000	0	813,638,407	102,459,184	916,097,591	99.84 %	1,479,409
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	435,639,000	0	370,585,694	64,885,050	435,470,744	99.96 %	168,256
000048. Pemeliharaan gedung kantor baru	394,487,000	0	331,649,003	62,792,700	394,441,703	99.99 %	45,297
000049. Pemeliharaan gedung kantor lama	13,872,000	0	13,799,076	0	13,799,076	99.47 %	72,924
000050. Halaman gedung kantor	10,630,000	0	10,599,390	0	10,599,390	99.71 %	30,610
000157. Pemeliharaan Pos Jaga Pengadilan Terpadu	2,100,000	0	0	2,092,350	2,092,350	99.64 %	7,650
000158. Pemeliharaan Pagar Pengadilan Terpadu	14,550,000	0	14,538,225	0	14,538,225	99.92 %	11,775
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	157,290,000	0	137,560,850	19,726,920	157,287,770	100.00	2,230
000051. Rumah Dinas (11 unit)	157,290,000	0	137,560,850	19,726,920	157,287,770	100.00	2,230
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	324,648,000	0	305,491,863	17,847,214	323,339,077	99.60 %	1,308,923
000052. Kendaraan Bermotor Roda 4	169,900,000	0	165,687,415	4,183,030	169,870,445	99.98 %	29,555
000053. Genset	8,000,000	0	5,950,000	2,000,000	7,950,000	99.38 %	50,000
000054. BBM untuk Kendaraan Pinjam Pakai dari Pemprov Sulut	25,000,000	0	24,999,413	0	24,999,413	100.00	587
000055. BBM untuk Kendaraan Dinas Sewa dari Biro Umum	50,000,000	0	49,901,889	0	49,901,889	99.80 %	98,111
000056. BBM Sewa Haice	25,000,000	0	17,903,303	6,289,184	24,192,487	96.77 %	807,513
000057. Kendaraan Bermotor Roda 2	8,000	0	0	0	0	0.00 %	8,000
000058. PC	5,840,000	0	5,835,000	0	5,835,000	99.91 %	5,000
000059. Laptop/Notebook	7,300,000	0	7,187,500	0	7,187,500	98.46 %	112,500
000060. Printer	10,350,000	0	9,318,000	1,000,000	10,318,000	99.69 %	32,000
000061. AC Split	12,200,000	0	10,753,000	1,375,000	12,128,000	99.41 %	72,000
000062. AC Standing	3,050,000	0	3,050,000	0	3,050,000	100.00	0
000063. Bahan Bakar Genset	8,000,000	0	4,906,343	3,000,000	7,906,343	98.83 %	93,657

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG**  
**Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**Satuan Kerja : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO**

Hal 6 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	109,704,000	0	96,472,000	10,312,000	106,784,000	97.34 %	2,920,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	40,824,000	0	40,824,000	0	40,824,000	100.00	0
000064. Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim	35,024,000	0	35,024,000	0	35,024,000	100.00	0
000065. Pakaian Dinas untuk PPNPN	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	68,880,000	0	55,648,000	10,312,000	65,960,000	95.76 %	2,920,000
000067. Honor Kuasa Pengguna Anggaran	14,448,000	0	12,040,000	2,408,000	14,448,000	100.00	0
000068. Honor Pejabat Pembuat Komitmen	21,024,000	0	15,768,000	2,336,000	18,104,000	86.11 %	2,920,000
000069. Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (PPSPM)	6,000,000	0	5,000,000	1,000,000	6,000,000	100.00	0
000070. Honor Bendahara Pengeluaran	5,232,000	0	4,360,000	872,000	5,232,000	100.00	0
000071. Honor Staf Pengelola Keuangan	7,776,000	0	6,480,000	1,296,000	7,776,000	100.00	0
000072. Honor Pengelola PNBPN	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
000073. Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Tingkat Korwil)	7,200,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100.00	0
000074. Honor Pengurus/Penyimpan BMN	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
002.0E Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	91,800,000	0	76,500,000	0	76,500,000	83.33 %	15,300,000
522141 Belanja Sewa	91,800,000	0	76,500,000	0	76,500,000	83.33 %	15,300,000
000075. Bantuan Sewa Rumah Dinas	91,800,000	0	76,500,000	0	76,500,000	83.33 %	15,300,000
002.0F PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	7,800,000	0	6,075,000	725,000	6,800,000	87.18 %	1,000,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	2,800,000	0	1,575,000	225,000	1,800,000	64.29 %	1,000,000
000076. Belanja Bahan Spanduk Pelantikan	2,800,000	0	1,575,000	225,000	1,800,000	64.29 %	1,000,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	5,000,000	0	4,500,000	500,000	5,000,000	100.00	0
000077. Jasa Rohaniawan	5,000,000	0	4,500,000	500,000	5,000,000	100.00	0
002.0G RAPAT KOORDINASI INTERNAL	5,460,000	0	5,169,000	0	5,169,000	94.67 %	291,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	5,460,000	0	5,169,000	0	5,169,000	94.67 %	291,000
000079. Konsumsi Snack	5,460,000	0	5,169,000	0	5,169,000	94.67 %	291,000
002.0H KOORDINASI/KONSULTASI	364,738,000	0	300,709,968	39,051,062	339,761,030	93.15 %	24,976,970

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 7 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	338,038,000	0	281,059,968	36,801,062	317,861,030	94.03 %	20,176,970
000081. Uang Harian	8,800,000	0	8,610,000	0	8,610,000	97.84 %	190,000
000083. Transpot Riil	5,250,000	0	3,193,380	683,500	3,876,880	73.85 %	1,373,120
000084. Penginapan	31,680,000	0	24,724,545	5,975,000	30,699,545	96.91 %	980,455
000085. Tiket	136,950,000	0	100,026,289	23,812,562	123,838,851	90.43 %	13,111,149
000086. Uang Harian	28,800,000	0	20,800,000	5,880,000	26,680,000	92.64 %	2,120,000
000087. Uang Representasi	2,250,000	0	600,000	450,000	1,050,000	46.67 %	1,200,000
000091. Transpot Riil	1,000,000	0	816,500	0	816,500	81.65 %	183,500
000095. Uang Harian (PN Tondano)	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	100.00	0
000096. Uang Representasi (PN Tondano)	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000097. Sopir (PN Tondano)	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000099. Uang Harian (PN Bitung)	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	100.00	0
000100. Uang Representasi (PN Bitung)	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000101. Sopir (PN Bitung)	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000102. Penginapan	6,840,000	0	6,828,000	0	6,828,000	99.82 %	12,000
000104. Uang Harian (PN Amurang)	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	100.00	0
000105. Uang Representasi (PN Amurang)	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000106. Sopir (PN Amurang)	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000108. Uang Harian (PN Airmadidi)	4,440,000	0	4,070,000	0	4,070,000	91.67 %	370,000
000109. Uang Representasi (PN Airmadidi)	300,000	0	150,000	0	150,000	50.00 %	150,000
000110. Sopir (PN Airmadidi)	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000112. Uang Harian (PN Kotamobagu)	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	100.00	0
000113. Tiket	10,440,000	0	10,435,020	0	10,435,020	99.95 %	4,980
000114. Uang Representasi (PN Kotamobagu)	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000115. Sopir (PN Kotamobagu)	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000116. Uang Penginapan Pimpinan (PN Kotamobagu)	886,000	0	800,000	0	800,000	90.29 %	86,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 099312 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 8 dari 8

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000117. Uang Penginapan (PN Kotamobagu)	2,152,000	0	2,150,000	0	2,150,000	99.91 %	2,000
000119. Uang Harian (PN Tahuna)	6,660,000	0	6,660,000	0	6,660,000	100.00	0
000120. Uang Representasi (PN Tahuna)	900,000	0	750,000	0	750,000	83.33 %	150,000
000121. Uang Penginapan Pimpinan (PN Tahuna)	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000122. Uang Penginapan (PN Tahuna)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
000123. Tiket PP (PN Tahuna)	9,570,000	0	9,549,200	0	9,549,200	99.78 %	20,800
000124. Uang Harian	5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000	100.00	0
000126. Uang Harian (PN Melonguane)	6,660,000	0	6,660,000	0	6,660,000	100.00	0
000127. Uang Representasi (PN Melonguane)	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
000128. Uang Penginapan Pimpinan (PN Melonguane)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000129. Uang Penginapan (PN Melonguane)	4,920,000	0	4,900,000	0	4,900,000	99.59 %	20,000
000130. Tiket PP (PN Melonguane)	13,050,000	0	13,026,360	0	13,026,360	99.82 %	23,640
000132. Transpot Riil	1,520,000	0	1,518,000	0	1,518,000	99.87 %	2,000
000133. Penginapan	160,000	0	0	0	0	0.00 %	160,000
000134. Tiket	15,800,000	0	15,782,674	0	15,782,674	99.89 %	17,326
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,700,000	0	19,650,000	2,250,000	21,900,000	82.02 %	4,800,000
000135. Transport Lokal utk Subbag Kepegawaian TI dan Subbag Keuangan Pelaporan	21,600,000	0	15,150,000	1,650,000	16,800,000	77.78 %	4,800,000
000136. Transport Lokal Rekonsiliasi SIMAK-BMN dan SAIBA	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000138. Uang Saku Pengawasan PN Manado	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
000139. Uang Representasi Pengawasan PN Manado	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
002.01 KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL	14,850,000	0	8,081,000	2,700,000	10,781,000	72.60 %	4,069,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,850,000	0	8,081,000	2,700,000	10,781,000	72.60 %	4,069,000
000137. Transport Lokal	14,850,000	0	8,081,000	2,700,000	10,781,000	72.60 %	4,069,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
**Satuan Kerja** : 099313 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>188,206,000</b>	<b>0</b>	<b>171,632,828</b>	<b>15,768,932</b>	<b>187,401,760</b>	<b>99.57 %</b>	<b>804,240</b>
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	188,206,000	0	171,632,828	15,768,932	187,401,760	99.57 %	804,240
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	188,206,000	0	171,632,828	15,768,932	187,401,760	99.57 %	804,240
<b>AEA Koordinasi</b>	<b>112,981,000</b>	<b>0</b>	<b>104,418,028</b>	<b>8,202,932</b>	<b>112,620,960</b>	<b>99.68 %</b>	<b>360,040</b>
<b>AEA.001 Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum</b>	<b>112,981,000</b>	<b>0</b>	<b>104,418,028</b>	<b>8,202,932</b>	<b>112,620,960</b>	<b>99.68 %</b>	<b>360,040</b>
<b>052 Dukungan Penyelesaian Perkara</b>	<b>112,981,000</b>	<b>0</b>	<b>104,418,028</b>	<b>8,202,932</b>	<b>112,620,960</b>	<b>99.68 %</b>	<b>360,040</b>
052.0A Pembinaan dan Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Tingkat Banding	112,981,000	0	104,418,028	8,202,932	112,620,960	99.68 %	360,040
521211 Belanja Bahan	400,000	0	160,000	0	160,000	40.00 %	240,000
000001. Atk dan penjiwaan laporan	400,000	0	160,000	0	160,000	40.00 %	240,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	112,581,000	0	104,258,028	8,202,932	112,460,960	99.89 %	120,040
000004. Uang Harian (PN Amurang)	8,512,000	0	8,510,000	0	8,510,000	99.98 %	2,000
000005. Uang Sopir (PN Amurang)	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000007. Uang Harian (PN Airmadidi)	6,660,000	0	6,660,000	0	6,660,000	100.00	0
000008. Uang Sopir (PN Airmadidi)	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000010. Uang Harian (PN Kotamobagu)	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000	100.00	0
000011. Uang Sopir (PN Kotamobagu)	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000012. Uang Penginapan (PN Kotamobagu)	9,060,000	0	9,050,000	0	9,050,000	99.89 %	10,000
000013. Uang Representasi (PN Manado)	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000015. Uang Harian (PN Tahuna)	3,330,000	0	3,330,000	0	3,330,000	100.00	0
000016. Tiket (PN Tahuna)	18,420,000	0	18,411,960	0	18,411,960	99.96 %	8,040
000017. Uang Penginapan (PN Tahuna)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000019. Uang Harian (PN Melonguane)	4,440,000	0	4,440,000	0	4,440,000	100.00	0
000020. Uang Penginapan (PN Melonguane)	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	100.00	0
000021. Tiket (PN Melonguane)	5,400,000	0	5,340,000	0	5,340,000	98.89 %	60,000
000023. Konsultasi DIPA 03	23,819,000	0	15,616,068	8,202,932	23,819,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
**Satuan Kerja** : 099313 PENGADILAN TINGGI MANADO

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000024. Uang Saku (PN Manado)	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000026. Uang Harian (PN Tondano)	5,180,000	0	5,180,000	0	5,180,000	100.00	0
000027. Uang Sopir (PN Tondano)	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000029. Uang Harian (PN Bitung)	5,920,000	0	5,920,000	0	5,920,000	100.00	0
000030. Uang Sopir (PN Bitung)	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
<b>BCA Perkara Hukum Perseorangan</b>	<b>75,225,000</b>	<b>0</b>	<b>67,214,800</b>	<b>7,566,000</b>	<b>74,780,800</b>	<b>99.41 %</b>	<b>444,200</b>
<b>BCA.U06 Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah</b>	<b>62,376,000</b>	<b>0</b>	<b>57,084,800</b>	<b>5,121,000</b>	<b>62,205,800</b>	<b>99.73 %</b>	<b>170,200</b>
<b>051 Pengiriman surat penahanan.</b>	<b>11,300,000</b>	<b>0</b>	<b>11,284,000</b>	<b>0</b>	<b>11,284,000</b>	<b>99.86 %</b>	<b>16,000</b>
051.OA TANPA SUB KOMPONEN	11,300,000	0	11,284,000	0	11,284,000	99.86 %	16,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,300,000	0	11,284,000	0	11,284,000	99.86 %	16,000
000036. Pengiriman Surat Penahan	11,300,000	0	11,284,000	0	11,284,000	99.86 %	16,000
<b>052 Pencatatan register perkara banding</b>	<b>37,742,000</b>	<b>0</b>	<b>33,330,150</b>	<b>4,371,000</b>	<b>37,701,150</b>	<b>99.89 %</b>	<b>40,850</b>
052.OA TANPA SUB KOMPONEN	37,742,000	0	33,330,150	4,371,000	37,701,150	99.89 %	40,850
521211 Belanja Bahan	3,390,000	0	2,600,000	750,000	3,350,000	98.82 %	40,000
000037. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	3,390,000	0	2,600,000	750,000	3,350,000	98.82 %	40,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34,352,000	0	30,730,150	3,621,000	34,351,150	100.00	850
000038. Alat Tulis kantor	34,352,000	0	30,730,150	3,621,000	34,351,150	100.00	850
<b>053 Minutasi</b>	<b>5,650,000</b>	<b>0</b>	<b>4,900,000</b>	<b>750,000</b>	<b>5,650,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
053.OA TANPA SUB KOMPONEN	5,650,000	0	4,900,000	750,000	5,650,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	5,650,000	0	4,900,000	750,000	5,650,000	100.00	0
000039. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	5,650,000	0	4,900,000	750,000	5,650,000	100.00	0
<b>054 Pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju</b>	<b>7,684,000</b>	<b>0</b>	<b>7,570,650</b>	<b>0</b>	<b>7,570,650</b>	<b>98.52 %</b>	<b>113,350</b>
054.OA TANPA SUB KOMPONEN	7,684,000	0	7,570,650	0	7,570,650	98.52 %	113,350
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,650,000	0	5,620,650	0	5,620,650	99.48 %	29,350
000040. Pengiriman Salinan Putusan	5,650,000	0	5,620,650	0	5,620,650	99.48 %	29,350
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,034,000	0	1,950,000	0	1,950,000	95.87 %	84,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 005 **MAHKAMAH AGUNG**  
**Unit Organisasi** : 03 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**Satuan Kerja** : 099313 **PENGADILAN TINGGI MANADO**

Hal 3 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000041. Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Pengaju	2,034,000	0	1,950,000	0	1,950,000	95.87 %	84,000
BCA.U07 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di Wilayah Tengah	12,849,000	0	10,130,000	2,445,000	12,575,000	97.87 %	274,000
051 Pengiriman surat penahanan.	1,515,000	0	934,000	411,000	1,345,000	88.78 %	170,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,515,000	0	934,000	411,000	1,345,000	88.78 %	170,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,515,000	0	934,000	411,000	1,345,000	88.78 %	170,000
000031. Pengiriman Surat Penahanan	1,515,000	0	934,000	411,000	1,345,000	88.78 %	170,000
052 Pencatatan register perkara banding	9,495,000	0	7,575,000	1,880,000	9,455,000	99.58 %	40,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	9,495,000	0	7,575,000	1,880,000	9,455,000	99.58 %	40,000
521211 Belanja Bahan	600,000	0	580,000	0	580,000	96.67 %	20,000
000032. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	600,000	0	580,000	0	580,000	96.67 %	20,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,895,000	0	6,995,000	1,880,000	8,875,000	99.78 %	20,000
000033. Alat Tulis Kantor	8,895,000	0	6,995,000	1,880,000	8,875,000	99.78 %	20,000
053 Minutasi	1,260,000	0	1,250,000	0	1,250,000	99.21 %	10,000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,260,000	0	1,250,000	0	1,250,000	99.21 %	10,000
521211 Belanja Bahan	1,260,000	0	1,250,000	0	1,250,000	99.21 %	10,000
000034. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	1,260,000	0	1,250,000	0	1,250,000	99.21 %	10,000
054 Pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju	579,000	0	371,000	154,000	525,000	90.67 %	54,000
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	579,000	0	371,000	154,000	525,000	90.67 %	54,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	579,000	0	371,000	154,000	525,000	90.67 %	54,000
000035. Pengiriman Salinan Putusan	579,000	0	371,000	154,000	525,000	90.67 %	54,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO  
NOMOR : 81 /KPT/W19-U/SK.OT1.6/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI MANADO**

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-

- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
  10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

**Memperhatikan** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI MANADO
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Manado dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Manado.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 14 Januari 2025

**KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,**



*XAMIN SUTIKNO*

XAMIN SUTIKNO *f*

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

NOMOR : 81 /KPT/W19-U/SK.OT1.6/I/2025

TANGGAL : 14 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI MANADO**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Amin Sutikno, S.H.,M.H.
2.	Ketua	R.A. Didi Ismiatun, S.H.,M.Hum.
3.	Koordinator Validasi Data	Arwin, S.H.
4.	Sekretariat	Nikson Ladjoma, S.Sos.,S.H.
5.	Anggota	Heru Purwanto, S.Kom. Ronald Yau, S.T. Enda Annatje Maukar, S.H.,M.H. Elsje Diane Rambli, S.H. Endang Widjajanti, S.Sos.,S.H.,M.H. Serly Yu. S.Kom. Charles Arthur Sinaij, S.E. Muhammad Fadly Syam, S.Kom. Indika Satriyana Agusta, S.Kom.,S.H. Asri Maulina Siahaan, S.Sos.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Danardono, S.H.,M.H. Mochammad Djoenaidic, S.H.,M.H.

  
**KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,**  
  
**AMIN SUTIKNO**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

NOMOR : 81 /KPT/W19-U/SK.OT1.6/I/2025

TANGGAL : 14 Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI MANADO**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Manado
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretariat	a. Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.



**KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,**

*Amin Sutikno*  
**AMIN SUTIKNO**